



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI
DENGAN
DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, KEPALA SKK MIGAS, DIRUT
PT PERTAMINA HULU ENERGI, DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: RDP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 14 Februari 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Bambang Haryadi, S.E./F-P.Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI
Acara	: 1. Penjelasan Kepastian Kontrak Kerjasama untuk Wilayah Kerja CPP Pekanbaru; dan 2. Lain-lain.
Hadir	: 39 orang anggota hadir dari 52 orang anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-PG/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-P.GERINDRA/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
5. H. Eddy Soeparno, S.H.,M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

- 7 orang anggota dari 11 anggota
1. H. Yulian Gunhar, S.H.,M.H.
 2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.

3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
7. Novri Ompusunggu

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

7 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam
2. Drs. H. M. Gadung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin
4. Ir. Lamhot Sinaga
5. H. Hasnuryadi Sulaiman, S.E.,M.A.B.
6. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A.,M.Sc.
7. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. R. Wulansari
2. Ramson Siagian
3. Katherine A. Oendoen
4. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons), M.Eng.Sc.
3. Rian Firmansyah, S.Pd.
4. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi.,M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
3. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Sartono Hutomo, S.E., M.M.
2. Zulfikar Hamonangan, S.H.
3. Rusda Mahmud

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E.,M.Si.
3. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU. (Dirjen Migas Kementerian ESDMRI)
2. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M. (Kepala SKK Migas)
3. Julius Wiratno (Deputi Operasi SKK Migas)
4. Taufik Adityawarman (Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi)
5. Jaffe Arizon Suardin (Dirut PT Pertamina Hulu Rokan)
6. Ir. Iskandar (Dirut PT Bumi Siak Pusako)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-P.GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII yang hadir secara *virtual*,
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI,
Yang kami hormati Pak Dirjen Migas Kementerian ESDMRI,
Yang kami hormati Pak Dwi Kepala SKK Migas, ini sama-sama pesilat ya,
Yang kami hormati Dirut Utama Pertamina Hulu Energi, Pak Budiman.

Ini diwakili ya? Oh iya, iya diwakili, ini surat dari Pertamina Hulu Energi, mewakilkan kepada Bapak Taufik Adityawarman, Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi dan 2 adalah Pak Jaffee Arizona Suardin, Direktur Pertamina Hulu Energi *Coastal Plains* Pekanbaru.

Yang kami hormati Dirut PT Bumi Siak Pusako, dan serta Jajaran dari seluruh mitra, baik dari Kementerian maupun SKK dan juga Pertamina Hulu Energi, serta Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sebelum saya mulai rapat, izinkan perkenalkan ada perubahan beberapa anggota Komisi VII, Pak. Pertama adalah:

1. H. Marwan Jafar, A-19 dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Beliau mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang semula di Komisi VI, sekarang di Komisi VII. Ini Komisi VII ini luar biasa Pak, di sini ada 3 menteri, Pak. Ada Menteri Koinfo, ada Menteri Pemuda dan

- Olahraga, ada Menteri PAN RB, jadi lengkap. Bahkan ex anggota Komisi VII ada yang jadi Menko Perekonomian.
2. Bapak Ramson Siagian. Ini pendekar Komisi VII, dan yang kita tarik kembali di Komisi VII untuk memperkuat Bapak-bapak sekalian, karena pandangan beliau luar biasa, Pak. Pak Ramson, A-104 Fraksi Partai Gerindra.
 3. Bapak Iwan Kurniawan, A-124 Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Kalimantan Tengah, Pak, yang semula Komisi VIII, sekarang Komisi VII.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima atas perhatian serta kehadiran Bapak dan Ibu Komisi VII, Anggota DPR Komisi VII, serta Dirjen Migas dan Kepala SKK Migas, Dirut Pertamina Hulu Energi atau yang mewakili, dan juga Dirut PT Bumi Siak Pusako beserta jajaran. Ini Pak Dirut Bumi Siak Pusako sudah sehat, Pak? Kemarin kita menerima surat, kena *Covid* nih Pak Nasir, gitu.

Sesuai undangan rapat yang telah disampaikan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPRRI pada Masa Persidangan III Tahun 2021-2022, pada hari ini Kamis, Komisi VII DPRRI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda:

1. Penjelasan kepastian kontrak kerja sama untuk wilayah kerja CPP Pekanbaru;
2. Lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, anggota Komisi VII DPRRI yang telah hadir berjumlah 19 anggota dari 52 anggota Komisi VII, yang terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi, dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap rapat DPRRI bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, izinkan saya meminta persetujuan anggota agar rapat dengar pendapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak/Ibu anggota Komisi VII DPRRI bahwa rapat ini akan diselesaikan pada pukul 16.30 WIB. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Satuan kerja khusus kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi yang diberikan tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penyelenggara pengelola dan pengelola kegiatan usaha hulu migas bumi pada tanggal 29 November 2018, telah menandatangani kontrak bagi hasil dengan PT Bumi Siak Pusako selaku kontraktor. Artinya, secara administratif sudah ada kejelasan alih kelola blok CPP 100% dikelola oleh PT Bumi Siak Pusako yang efektif berlaku mulai tanggal 9 Agustus 2022.

Terkait dengan alih kelola tersebut, maka pada kesempatan ini Komisi VII DPRRI ingin memperoleh informasi di antaranya:

1. Pertimbangan alih kelola blok CPP dari BOB Pertamina. BOB itu singkatannya Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako kepada PT Bumi Siak Pusako.

Jadi BOB-nya antara Pertamina PT Bumi Siak Pusako, itu diserahkan ke, *full* 100% ke PT Bumi Siak Pusako ya, Pak?

Iya, silakan.

PEMERINTAH :

Izin Pimpinan, terima kasih.

Pada saat ini sampai Agustus 2022, PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu, Pak yang mengelola, gitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ini ada kesalahan dari ini sekretariat. PT Bumi Siak Pusako dan PT Pertamina Hulu ya? *Oke*, baik.

Kedua adalah kemampuan dan kapasitas PT Bumi Pusako dan Pertamina Hulu Energi sebagai kontraktor. Betul?

Yang ketiga adalah penjelasan berpisahanya BOB Pertamina PT Bumi Siak Pusako, karena informasinya Pertamina masih berminat untuk tetap menjadi kontraktor Blok CPP.

Selanjutnya, untuk efektifnya rapat dengar pendapat ini, kami berikan kesempatan kepada Pak Dirjen Migas, Kementerian ESDM, juga Pak Dwi, Kepala SKK Migas, Pak Dirut Pertamina Hulu Energi dan juga, yang atau mewakili, dan juga Pak Dirut Bumi Siak Pusako, untuk dapat menyampaikan paparan dan penjelasannya.

Dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dirjen terlebih dahulu, terima kasih.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (IR. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., PH.D., IPU.):

Terima kasih. Pak Ketua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI, Kepala SKK Migas beserta jajarannya, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi yang mewakili, Bapak Direktur Pengembangan dan Produksi, Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako beserta jajarannya, Direktur Pertamina Hulu Rokan dan jajarannya, Para Pejabat di lingkungan Dirjen Migas, serta Hadirin yang berbahagia.

Selamat siang.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan amanat konstitusi yaitu Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan agenda utama penjelasan kepastian kontrak kerja sama untuk wilayah kerja *Coastal Plains and Pekanbaru (CPP)* dan lain-lain.

Pimpinan dan anggota Komisi VII DPRRI yang terhormat.

Kontrak Wilayah kerja *Coastal Plains and Pekanbaru* atau CPP merupakan Badan Operasi Bersama (BOB) yang dikelola oleh PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) dan PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) dengan pembagian *participating interest* masing-masing sebesar 50%. Kontrak lama wilayah kerja CPP berlangsung dari 9 Agustus 2002 sampai dengan 8 Agustus 2022, menggunakan skema *cost recovery*. Adapun kontrak perpanjangan akan berlangsung dari 9 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2042 dengan

skema *gross split* dengan *signature* bonus sebesar 10 juta dan total nilai komitmen kerja pasti (KKP) sebesar USD 134 juta yang meliputi studi GnG, seismic, 3D and, dan 2D, pemboran sumur eksplorasi, serta *enhanced oil recovery*.

Untuk menaikkan produksi wilayah kerja CPP melalui pelaksanaan kewajiban komitmen kerja pasti dari kontrak kerja sama bagi hasil perpanjangan wilayah kerja CPP, kontraktor akan melaksanakan kegiatan *field trial and pilot chemical EOR* pada lapangan pedada dengan target *full field scale* di tahun 2028, 2029 diberikan dengan tambahan produksi kurang lebih 1.000 *barrel per day* di tahun 2030.

Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu merupakan badan kerja sama operasi untuk mengolah blok CPP yang dibentuk antara PT Bumi Siak Pusako selaku Badan Usaha Milik Daerah dan PT Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara. Organisasi BOB CPP Siak Bumi Pusako Pertamina, dipimpin oleh seorang General Manager yang membawahi 11 manager, antara lain: *Manager Exploration, Exploitation, Strategic and Planning, Strategic Planning and Risk Management*, serta *Senior Operation Manager*. Di bawah *Senior Operation Manager* terdapat *Operational Production, Operation Manager, Dealing and Recover Manager*, serta *Operation Support Manager*.

Selanjutnya, jumlah cadangan minyak pada wilayah kerja CPP per 1 Januari 2021 terdiri atas cadangan terbukti (P1) sebesar 58,4 juta *stock tank barrels*, cadangan mungkin (P2) sebesar 16,6 juta *stock tank barrels*, dan cadangan harapan (P3) sebesar 10,4 juta *stock tank barrels*, dengan total cadangan mencapai 85,4 juta *stock tank barrels*. Adapun untuk cadangan gas per 1 Januari 2021 sebesar 0,7 *billions standard cubic feet* yang masih merupakan cadangan harapan (P3).

Profile produksi wilayah kerja CPP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 memiliki tren menurun seperti ditunjukkan dalam gambar di atas. Berdasarkan data operasional tahunan per 31 desember 2021, produksi minyak wilayah kerja CPP sebesar 8.520 *barrel oil per day*, sedangkan produksi gas hingga saat ini belum ada.

Pimpinan dan anggota Komisi VII DPRRI yang terhormat.

Dasar hukum perpanjangan kontrak wilayah kerja CPP mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di mana pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 tahun”. Ayat (2) “Badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat

- mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak sesama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 tahun”.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 ayat (1) sampai dengan (7).
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya termuat pada Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (4) yang secara garis besar, maaf. Peraturan Menteri Gas Bumi yang berakhir kontrak kerja sama termuat pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (4) yang secara garis besar mengatur mekanisme pengaturan perjanjian kontrak serta kerja sama, maaf ini kok salah, maaf saya ulangi lagi. Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (4) secara garis besar mengatur mekanisme pengajuan perpanjangan kontrak kerja sama kepada menteri dengan waktu 20 tahun, di mana permohonan pengajuan tersebut disampaikan lebih cepat 10 tahun dan paling lama 20 tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir. Selanjutnya.
 - b. Pasal 8 ayat (1) sampai dengan (3) yang menyebutkan bahwa, PT Pertamina Persero dapat mengajukan permohonan alih kelola kontrak kerja sama kepada menteri paling cepat 10 tahun paling dan lambat 2 tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir.

PT BSP selaku kontraktor *existing* menyampaikan permohonan perpanjangan kontrak wilayah kerja CPP melalui surat Nomor 38 Tahun 2018 tertanggal 4 Mei 2018, sedangkan Pertamina sesuai regulasi Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 menyampaikan permohonan pengolahan lanjut wilayah kerja CPP melalui surat Nomor 18 tertanggal 17 Mei 2018.

SKK Migas merekomendasikan PT BSP untuk mengelola wilayah kerja CPP pasca 8 Agustus 2022 dengan *participating interest* 100% berdasarkan surat nomor 0786 tahun 2018 tertanggal 21 September 2018. Berdasarkan berita acara Tim 22 WK, tanggal 24 September 2018, maka Tim 22 WK merekomendasikan untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada PT BSP dengan pertimbangan berikut:

- a. Nilai komitmen kerja pasti yang ditawarkan telah meningkat dari usulan awal yakni 41 juta menjadi 130,4 juta, sehingga telah sesuai dengan perhitungan SKK Migas.
- b. PT BSP mengajukan besaran *signature* bonus sebesar USD 10 juta dan tanpa diskresi atau tambahan *split*.
- c. Kondisi *finansial* PT BSP memiliki kesanggupan pendanaan untuk pembayaran *signature* bonus, jaminan pelaksanaan dan melaksanakan komitmen kerja pasti serta mengelola wilayah kerja CPP.

- d. Proposal yang disampaikan oleh Pertamina nilainya jauh di bawah dari proposal PT BSP, yaitu KKP sebesar USD 61 juta, *signature* bonus sebesar USD 1 juta, tanpa diskresi atau 10 juta dengan 5% diskresi atau USD 20 juta dengan 10% diskresi.
- e. Pertamina tidak bersedia memperbaiki proposal dan menerima apabila pemerintah memberikan pengelolaan wilayah kerja CPP kepada PT BSP.

Berdasarkan rekomendasi SKK Migas dan Tim 22 WK dimaksud, maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1997 Tahun 2018 Tanggal 5 November 2018 yang menetapkan PT BSP sebagai pengolah lanjut wilayah kerja CPP pasca 8 Agustus 2022. Adapun kontrak kerja sama perpanjangan wilayah kerja CPP telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2018 dengan skema *gross split* untuk jangka waktu 20 tahun yang akan berlaku efektif pada 9 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2042.

Pimpinan dan anggota Komisi VII DPRRI yang kami hormati,

Demikian penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan. Selanjutnya, kami mengharapkan masukan dari pimpinan dan anggota Komisi VII.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Dikit izin Pimpinan, dikit.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Sedikit, Pimpinan.

Berarti perpanjangan ini sebelum Pak Dirjen dan sebelum Kepala SKK yang sekarang ya, Pak? Nanti saya minta perlu penilaian.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik.

Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan Pak Dwi, Kepala SKK Migas. *Monggo*.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak dan Ibu anggota Komisi VII yang kami hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Pak Pimpinan, saya hanya akan menambahi beberapa yang, melengkapi, melengkapi beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Mohon izin, saya langsung saja mungkin.

Tadi yang informasi halaman pertama ini mengenai kondisi umum, tadi sudah disampaikan dan kemudian kami lanjut saja. Di sini ada kami menyiapkan skema bagaimana permintaan Pak Nasir yang terhormat pada RDP yang lalu mengenai distribusi *revenue* dan khususnya terkait dengan *cost recovery* dari tahun ke tahun sejak 2012. Kami tampilkan seperti ini. Mungkin, dan materinya ada dibawa sekalian, kalau nanti di sana. Dan kemudian secara detail *next*-nya di *cost recovery*-nya, *cost recoverable* juga rincian di sana apa, untuk *cost recovery*-nya juga kami juga sampaikan dalam RDP ini.

Kemudian kami proses perpanjangan, kami hanya sampaikan, tambahkan di halaman 10 mengenai komitmen kerja pasti, rinciannya. Tadi Pak Dirjen sudah sampaikan nilainya yang USD 130 juta tadi selama 5 tahun, dan kegiatannya seperti ini adalah tahun pertama apa saja, dan nilainya juga sudah disebutkan di sana, studi GnG, 3D *seismic acquisition processing*, *exploration well*. Jadi ada nanti, berarti tahun pertama karena akan ada 2 sumur ngebor, kemudian EOR *field trial*. Kemudian tahun kedua nanti akan ada studi GnG, *second seismic acquisition processing*, *exploration well* juga ada, dua sumur juga, EOR *field trial* lanjutan. Studi GnG tahun ketiga, *exploration well* ada lagi, dua sumur lagi, kemudian ada EOR *pilot and monitoring*. Kemudian tahun keempat *exploration well* ada satu sumur, EOR *pilot monitoring* satu proyek, dan tahun yang kelima *exploration well* ada satu sumur. Total nilai sedemikian, dan potensi yang diperkirakan hasil dari *exploration*, yang tentu saja ini akan nanti tergantung hasil dari eksplorasi diperkirakan kira-kira gambaran seperti ini.

Yang biru tua adalah *existing*, yang biru tua di bawah, kemudian yang ungu adalah *exploration low risk*, yang potensi untuk bisa didapatkan lebih optimis, dan yang hijau adalah *exploration* dengan *high risk*. Mudah-mudahan ini akan bisa, bisa diperoleh mudah-mudahan, tapi ini kita sebut *high risk*.

Mungkin dari kami Pak Pimpinan, ya ini yang dapat kami tambahkan, nanti hal lain yang lebih detail kami akan lengkapkan.

Terima kasih Bapak.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Sedikit mungkin, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya, silakan Pak Nasir.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Pak Kepala SKK, mungkin perlu ditambahkan penjelasan bahwa sejak tahun 2002 sampai sekarang apakah ada peningkatan produksi yang dilakukan oleh mereka, atau adakah teknologi yang dimasukkan untuk penambahan sumur baru, atau teknologi apa namanya terserah. Menurut saya waktu kita kunjungan sama SKK kemarin di sana dengan Pak Rudi ya, itu sudah dilaporkan itu tapi mungkin tolong dijelaskan supaya biar apa sih kategorinya memilih orang untuk kita percaya dilanjutkan gitu. Nah, itu kan satu kategori itu untuk menunjuk seseorang atau salah satu perusahaan, bagaimana gitu supaya bisa diberikan kepercayaan kembali gitu. Nah, sementara waktu laporannya kami terima di SKK kemarin, dari 40 ribu barrel 2002 sampai sekarang tinggal 8 ribu. Jadi, tidak ada satu peningkatan pun yang dilakukan di sini gitu loh.

Nah, mungkin itu mohon disampaikan Pak, seperti apa sih secara teknis? Apakah perusahaan ini dinyatakan baik secara teknologi? Apakah perusahaan-perusahaan ini baik dinyatakan secara bisnis? Nah gitu. Itu maksud saya, saya minta masukkan dari Pak SKK Pak, biar, itu menjadi.

KETUA RAPAT :

Iya, silakan langsung di ini, jawab saja Pak Dwi.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Iya pak.

Mohon izin Pak Julius langsung. Mungkin kalau Pak Julius bisa nyampaikan, dan memang halaman 4 ya tolong.

KETUA RAPAT :

Mungkin singkat-singkat dulu, karena kan habis ini masih ada paparan.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Iya, betul.

Jadi, memang sejauh ini masih *decline* 7%. Tahun 2021 kemarin produksinya atau *lifting*-nya 8.300 kalau *nggak* salah ya. Terus kemudian memang tahun ini kita punya komitmen untuk diharapkan naik ke 9 ribu ya Pak? ke 9 ribu. Jadi itu, tapi ini kan masih rencana, tapi posisi yang lalu adalah seperti gambar yang titik-titik merah. Silakan Pak Julius, mungkin singkat saja Pak Julius. Kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Nasir, apakah ada teknologi baru atau teknik baru yang dikembangkan di sana, silakan.

DEPUTI OPERASI SKK MIGAS (JULIUS WIRATNO):

Iya, mohon izin, Bapak Pimpinan.

..(*suara tidak jelas*).. untuk menambahkan bahwa memang kenyataan, fakta, realitas bahwa dari tahun 2002 *decline*. Ini memang *decline*, tapi dengan usaha-usaha kita tahan, kalau misalnya, kalau tidak ada usaha-usaha ekstra, implementasi teknologi baru misalnya, saat itu yang ada, *decline*-nya menjadi 17%. Tapi kita sekarang bisa *decline*-nya menjadi 7%. Itu indikasi bahwa kita memang implemen berupa teknologi yang pada saat itu. Kalau ke depannya ada lagi, ada kemajuan teknologi, tentu saja akan kita *improve* terus. Seperti itu yang kemarin memang sudah kita sampaikan pada waktu di Riau, tapi memang mungkin masih ada lagi teknologi baru yang akan kita kembangkan.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Jadi mungkin sekarang belum, ringkasnya belum ada signifikan, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, Pak Dwi.

Mungkin entar pendalaman entar ada sesinya.

Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau yang mewakili.

Silakan.

DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI PT PERTAMINA HULU ENERGI (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Baik, Pak.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Izinkan saya mewakili Pak Budiman Parhusip yang saat ini sedang menjalani isoman. Nama saya Taufik Adityawarman, Direktur Pengembangan dan Produksi PHE.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin Pimpinan. Bapak sebagai apa?

DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI PT PERTAMINA HULU ENERGI (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Direktur Pengembangan dan Produksi PHE, Pak, mewakili Pak Budiman Parhusip.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Mungkin, izin Pimpinan, sebelumnya kan ada dirut, mungkin lebih bagus Dirut yang secara teknis.

KETUA RAPAT :

Gini, sebentar.

Pak ini, karena beliau yang mendapatkan mandat, *nggak* apa-apa prolog dulu, Bang. Untuk teknisnya bisa Pak Buyung entar, paparkan berdua bisa paket kok.

Silakan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ya, kalau Pimpinan bagus gitu, ya okelah.

DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI PT PERTAMINA HULU ENERGI (TAUFIK ADITYAWARMAN):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan Rapat.

Izinkan saya mungkin menambahkan sedikit bahwa saat ini memang sampai dengan tanggal 8 Agustus kami diberi mandat juga bersama-sama dengan BSP dari Pertamina sebagai badan operasi bersama untuk mengelola lapangan CPP sejak 2022. Nah, tentunya dalam perkembangan rencana alih kelola yang pada tanggal 9 Agustus 2022, kami bersama-sama dengan BOB, selama ini bagaimana mengelola lapangan BOB tersebut melalui organisasi yang sudah disiapkan secara organik di BOB BSP, di mana masing-masing pihak dalam hal ini Pertamina juga ada pengawas, 2 orang pengawas di BOB BSP itu dalam bentuk *join management committee*, yang memang melakukan rapat-rapat OCM TCM yang untuk memastikan program-program kerja yang dilakukan itu berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks untuk ke alih kelola 2022, 8 Agustus, ya tentunya kami sedang menyiapkan tim transisi supaya nanti dan mungkin di, iya, tim transisi supaya alih kelola seperti ini yang sebelumnya juga sudah kami lakukan di lapangan Aceh di NSB, itu bisa berjalan mulus. Sehingga, harapannya memang ke depan operator baru, dalam hal ini BSP, bisa melanjutkan program-program kerja yang diharapkan oleh baik SKK Migas maupun dari Dirjen Migas untuk menjaga kesinambungan produksi.

Nah, untuk detailnya mungkin Pak Buyung Direktur Teknis untuk ke Pertamina Hulu Rokan, dalam hal ini sebagai Dirut PHE CPP, silakan untuk menambahkan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Waalaikumsalam.

Pak Buyung, mungkin karena lebih teknis tadi Pak Nasir biar lebih jelas.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ROKAN (JAFJE ARIZON SUARDIN):

Izin Pimpinan untuk menambahkan sedikit informasi.

Jadi, seperti yang disampaikan tadi, kami mulai untuk di *roll* ini sekitar beberapa bulan yang lalu. Di mana di blok ini tentunya sudah di bentuk perjanjian *operation* dan *exclusive operation*. Jadi, semenjak 2018, ketika keputusan dari pemerintah telah ada, di mana blok ini akan diteruskan oleh BOB, oleh BSP, maka ada perjanjian *joint operation* dan *exclusive operation* tadi, di mana mengatur investasi di akhir periode kontrak yang lama.

Jadi, dengan *exclusive operation* tadi diharapkan kami berkontribusi ke *baseline production*. Sedangkan sumur-sumur baru dan lain-lain itu dibantu oleh dari teman-teman BSP (Bumi Siak Pusako) dan tentunya potensi-potensi yang ada itu nanti di-*develop* setelah ada kontrak baru dengan BSP 100%.

Itu mungkin Pak kalau sedikit tambahan informasi mengenai sedikit teknis yang ada di sana.

Terima kasih, Bapak.

KETUA RAPAT :

Baik.

Selanjutnya, dari Dirut PT Bumi Siak Pusako. Ini 100% ya pengelolaannya ke BSP ya sekarang? Hah?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak, 9 Agustus mulai 2022.

KETUA RAPAT :

29 Agustus itu 100% Bumi Siak Pusako ya? Oh iya. Saya soalnya pernah, Pak 2018 ke sana. Entar saya ini ceritanya entar.

DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO (Ir. ISKANDAR):

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII dan anggota Komisi VII.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Izin Pak Dirjen, Pak Kepala SKK, dan PHE.

Kami hanya menambahkan, karena sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Kepala SKK, dan juga Pimpinan Pak Taufik dan Pak Jaffe tadi. Substansi kita, mungkin kami sampaikan dulu susunan pemegang saham

PT Bumi Siak Pusako, di mana Pemprov Riau adalah 18%, Kabupaten Siak 72,29%, Kampar 6,02%, Kabupaten Pelalawan 2,41%, dan Pemko Pekanbaru 1,21%. Jadi, ada 5 kabupaten/kota dan provinsi yang sebagai pemegang saham PT Bumi Siak Pusako.

Lanjut lagi. Kontribusi PT BSP pada daerah adalah, sampai saat ini PAD yang dihasilkan adalah sebesar 3,16 triliun dan kita ada program CSR juga, *Corporate Social Responsibility* kita sampai saat ini ada 78,14 miliar, dan saat ini sumber daya manusia yang ada di BOB adalah ..(*suara tidak jelas*).., PT Bumi Siak Pusako sebesar 82%, Pertamina sebesar 8%, dan lain-lain dari BOB *recruit* dan pegawai waktu tertentu adalah 10%. Proses perpanjangan kerja sama mungkin sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, izin lanjut. Penandatanganan juga sudah dilakukan pada 2018. Dan KKP juga seperti disampaikan tadi, maaf.

Nah, ini adalah janji kami ya pada saat penandatanganan eh apa, proposal perpanjangan. Jadi, ini akan kami lakukan dengan skema-skema ada *high case*, dan *low case*. Ini semua ini tentu kami akan berusaha dengan sebaik mungkin agar produksi bisa meningkat. Jadi, jika eksplorasi-eksplorasi kami berhasil, dengan *high case* bisa sampai hampir 50 ribu barrel Pak, sedangkan dengan eksplorasi *low case* lebih dari 20 ribu barrel. Bisa digambar di situ. Jadi, kalau normalnya di bawah itu, Pak tadi, pada *existing*, yang warna biru. Ini akan kami lakukan selama 20 tahun itu, Pak. Jadi, kami tentu berusaha dengan sekuat tenaga agar kami bisa mencapai target-target yang ditetapkan. Seperti pada tahun ini kita masih ada 15 sumur pengembangan, sumur eksploitasi, dan 1 sumur eksplorasi.

Seperti disampaikan tadi bahwa, oleh Pak Jaffe tadi bahwa kita saat ini sudah melakukan. Dari tahun 2020 sampai 2022, kita sudah melakukan *exclusive operation* atau *sole risk*. Jadi, pembiayaan untuk pengeboran sumur-sumur eksplorasi dan eksploitasi ditanggung sendiri oleh BSP, dan *alhamdulillah* berjalan dengan lancar.

Mungkin itu yang bisa disampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sedikit saya mengingat. Saya jadi 2018, saya kalau *nggak* salah pernah pergi ke Bumi Siak Pusako ini. Waktu itu kita ada apa namanya, ringkasan

kunjungan kerjanya, kunjungan spesifik waktu itu. Ini jadi PT Bumi Siak Pusako ini sekarang menjadi pengelola utama ya kan? Untuk 2022 maksud saya.

Baik.

Untuk menyingkat waktu, jadi saya berikan kepada anggota Komisi VII yang mungkin mau melakukan pendalaman. Kita mulai dulu dari Fraksi PDI Perjuangan. Oh *nggak* ada, mungkin selanjutnya Golkar? Tadi Pak Lamhot? Golkar *nggak* ada, saya serahkan ke Fraksi Partai Gerindra, Pak Ramson Siagian.

Silakan Pak Ramson.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua Rapat,
Rekan-rekan anggota yang terhormat,
Pak Kepala SKK Migas,
Pak Dirjen Migas,
Direktur Hulu, Direktur Pertamina Hulu,
Direktur Pertamina Hulu Rokan, dan
Semua yang saya hormati.

Jadi, cukup menarik pembahasan ini, karena dengan peralihan blok CPP dari Chevron ke Pertamina, dan Pertamina bekerja sama dengan ini PT Bumi Siak Pusako ya? Itu yang mengelola sekarang kan? Yang mengerjakan dengan Pertamina ya? Tentu tidak untuk berakibat menurunnya produksi minyak yang ada di blok tersebut. Di situ diperlukan kepiawaian bagaimana mengarahkan dari SKK Migas, dengan regulasi yang tepat dari Dirjen Migas, dan juga bagaimana mengelola operasionalnya di lapangan. Jadi, kalau saya memperoleh data, bahwa ada penurunan produksi minyak, padahal di satu sisi sekarang ada tren kenaikan harga minyak. Tentunya kalau penurunan produksi minyak berlanjut, itu tidak bisa menggunakan peluang lagi naiknya harga minyak di pasar global.

Ini PSC block *Coastal Plain* atau CPP, ini saya lihat ini ditandatangani 9 Agustus 2002 dan, oh berakhir 2022 dengan *participating interest* 50% PT Bumi Siak Pusako dan 50% Pertamina Hulu. Nah, ini yang mau saya tanyakan dari sisi Pertamina, ini keinginannya *participating interest* itu mau ditingkatkan 100% atau bagaimana nih? Karena saya lihat ini kalau menggunakan skema KBH *gross split*-nya, *participating interest* 100% BSP, *signature* bonus USD 10 juta,

komitmen pasti 5 tahun sebesar 130 juta dolar. Ini yang masih memerlukan pendalaman juga.

Terus, sementara itu dulu Pak Ketua, karena saya perlu membaca dulu ini data-data yang disampaikan oleh Pertamina, SKK Migas, dan juga Bumi Siak Pusako.

Demikian.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Baik.

Untuk diingat bahwa dulu 13 sampai 15 Maret kita ke Bumi Siak Pusako dipimpin Pak Gus Irawan dulu. Dulu kalau *nggak* salah namanya PT Bumi Siak Riau, iya, Pak? Bukan ya Pak? PT Bumi Siak Pusako Riau dan pemprov, ini pemiliknya Pemprov Riau ya sebagian?

DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO (Ir. ISKANDAR):

Tadi disampaikan bahwa, BMD ini pemegang saham utamanya adalah PT Kabupaten Siak, dilanjutkan dengan Provinsi Riau 18%, dan sisanya adalah kabupaten.

KETUA RAPAT :

Sebentar, PT apa tadi yang?

DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO (Ir. ISKANDAR):

PT Bumi Siak Pusako, Pak, yang ini.

Jadi, yang Bapak datang kemarin atau Komisi VII datang itu, saat itu adalah ke BOB, Pak, ke lapangannya. Jadi, bukan ke kami waktu itu. Jadi, Bapak langsung ke lapangan, ke *site*, di Zamrud kalau *nggak* salah kemarin itu. Jadi, itu operasional, Pak antara BSP dan Pertamina. Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu, gitu, Pak. Nah, kalau kami seperti di induknya Pak dengan Pertamina.

KETUA RAPAT :

Baik.

Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem. Pas? Lanjut, Fraksi Partai PKB, PKB. PKB *nggak* ada, langsung Fraksi Partai Demokrat.

Silakan Pak Nasir.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Ketua, PDI Perjuangan belum Ketua.

KETUA RAPAT :

Iya, gantian yang hadir fisik dulu Pak Yulian Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Siap Ketua.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII,
Yang saya hormati teman-teman Komisi VII,
Saudara Dirjen dan seluruh jajarannya,
Kepala SKK dan seluruh jajarannya,
Pertamina Hulu dan seluruh jajarannya,
BOB dan BSP dan seluruh jajarannya.

Dan di sini mungkin menyambung dari kunjungan yang kemarin Pak Dirjen, kepada SKK juga. Tadi, penjelasannya belum dijelaskan Pak, hasil auditnya mana? Karena kita ingin membahas hasil audit 2002 ke 2021. Nah, kita sudah minta SKK itu kemarin Pak, izin Pak Kepala SKK, itu untuk menjadi barometer menurut kami, bagaimana pengelolaan sumur ini selama ini, gitu. Nah, kami warga Riau ini tidak merasakan sentuhan ini sama sekali. Sampai hari ini pun, masyarakat Siak pun, satu putra dan putrinya tidak ada yang sekolah perminyakan dari hasil pengelolaan yang kita berikan ini. Di mana kontribusi perusahaan ini kepada masyarakat?

Tadi CSR, masalah petani. Padahal kan kalau kita hitung pak, cukup besar hasilnya ini. Dan pengurus-pengurus perusahaan ini, dari bupati, ke keluarga bupati, anak bupati ke bupati, gitu-gitu saja ini. Jadi *nggak* ada profesional yang akan dikembangkan di perusahaan ini. Nah, saya minta SKK menilai ini, Pak. Ini satu penilaian keprofesionalan perusahaan. Saya takutnya Pertamina selama ini yang jadi kuda pedatinya. Nah, ini jadi tau ke di rumah ngambil setoran. Nah, jadi makanya saya minta *cost recovery*-nya, Pak, mana hasil *cost recovery* tadi? Itu auditnya mana?

Nah kita nggak setuju, lebih bagus ini kita balik dari 40 ribu, dari 2002 ini kita serahkan, ini 40 ribu barrel per hari hasilnya. Sampai ini hari cuman 8 ribu. Sampai ini hari tidak ada sumur baru yang dibilang tadi sumur baru. Pas kami kunjungan 2 bulan, 3 bulan yang lewat ini baru mau di bor karena kita datang. Nah, saya minta Pak SKK nanti sampaikan Pak, gitu loh. Ini kerjaan aneh-aneh gitu loh. Beda dengan Rokan yang baru berapa bulan kita kasih, peningkatannya sudah nampak gitu loh, baru hitungan bulan. Nah saya minta Pak SKK ini jadi pembanding, gitu loh. Nah, ini kan kita mau meningkatkan pendapatan negara dan mendapatkan pendapatan produksi untuk menghasilkan buat untuk negara. Jadi, Siak itu sebagai negara dari Republik Indonesia, kabupaten-kabupaten lain maupun Provinsi Riau. Ada berapa kategori Pak, kita ingin menilai orang baik dan punya kemampuan? Dari mana Bapak bisa menilai baik dan punya kemampuan, kalau dari 2002 sampai 2021 hasilnya menurun terus. Dari 40 ribu barrel, tinggal 8 ribu barrel. Apa yang dilakukan? Tidak ada Pak, sampai hari ini tidak ada teknologi satu pun yang dikembangkan di sumur BOB ini.

Nah, saya minta Pak Dirjen dengan timnya, itu saya sudah minta turun. Harusnya laporannya sudah ada hari ini. Waktu kami ke sana itu dengan Pak Direktur, itu baru mau ngebor Pak ya? Itu sumur baru, baru mau ngebor, itu pun entah siap sampai ini hari nggak tahu entah enggak. Mungkin maunya dilihat Pak. Apa ecek-ecek saja ini bahas orang gitu.

Jadi, saya minta ini dicabut kerja samanya, penunjukannya dicabut, dikerjasamakan saja kepada Pertamina yang memiliki teknologi dan punya kemampuan, maupun tenaga ahli yang cukup untuk mengerjakan sumur tersebut. Kalau hal pembagiannya kita bagi untuk daerah, saya setuju karena Rokan juga membagikan untuk daerah. Saya kalau, tapi kalau tadi anak Putra Siak ada yang sudah sekolah dari Amerika perminyakan, 20 tahun ini Pak, 20 tahun, ini bukan cukup waktu yang pendek ini, panjang sekali. Harusnya sudah pulang anak itu, sudah duduk di perusahaan itu.

Saya 2002 Pak, pengurus partai di sana, sampai 2004 di sana. Satu bangunan pun nggak ada yang berubah. Bangunan, bukan sumur lagi, bangunan nggak ada yang berubah. Boleh diambil 2002 fotonya seperti apa, hari ini seperti apa, sama tidak? Apa ini yang harus diperpanjang? Keluarganya bupati semua di situ. Bupati, sekarang anak bupati jadi komisaris utama, ini direktornya ini pun keluarga bupati, semua keluarga bupati. Jadi kapan mau profesional? Kapan mau dikembangkan sumur ini?

Kalau tadi berpresentasinya, "kami akan menggaet satu perusahaan profesional", "kami sudah melaksanakan regulasi", tadi ada catatan, saya catat nih. 2020 ada operasional yang dibiaya sendiri oleh BSP. Saya mau lihat nanti auditnya ini, Pak. Saya mau cek ini, apa hasilnya ini? Nah, di mana Pertamina 2020 ini? Apa kalian tidur-tidur saja? Ini tadi bahasa dia ini, saya catat ini. 2020

“dengan biaya sendiri” katanya. Itu ada itu tadi kalimatnya, kalau saya nggak silap ya, telinga saya masih tajam tadi. 2020 dia pakai uang sendiri, biaya sendiri, Pertamina di mana? Nah, saya nggak ngerti nih. Mana Pertamina, mana ini, apa ini jadi *pacaan* saja kata orang Jawa ini. Apa *pacaan* itu? Apa namanya? Jadi *ecek-ecek* ya Pak ya? Bahasanya gitu kalau orang Medan. Nah bohong-bohong. Jual kuyuk kata orang Medan bang, jual kuyuk kata orang Medan. Nah ini gini.

Jadi, saya minta Pak, ini kita audit investigasi. Nah, jadi biar jelas prosesnya seperti apa gitu. Pak Dirjen, saya minta turunkan timnya, mana yang dibilang hasil produksinya nambah? Karena kami sudah lihat nih grafiknya. Waktu itu yang mewakili bukan beliau, bukan Pak Tulus ya? Pak siapa Pak nya? Pak Julius, bukan. Waktu itu Pak Rudi, Pak, dengan Pak Direktur ya? kita pergi ke sana. Kita minta, Pak, apa pun berkas yang kita minta nggak ada, persentasi pun nggak dipresentasikan, ditanya ke kanan, jawabnya yang lain gitu, ditanya ke sini, jawabnya yang lain. Jadi, kita bingung gitu. Waktu, mungkin izin interaktif Pimpinan, benar nggak Pak Direktur, kita waktu itu nanya seperti itu? yang jawab itu SKK malah, Pak. SKK yang bawa data, bukan perusahaan BSP ini. Nah itu.

Jadi, jangan dibuat bohong-bohong gitu loh. Saya minta semua pihak hukum untuk memeriksa BSP ini. Ke mana uang BSP dari 2002 sampai 2021? Kita mau cek Pak keuangannya, mana uangnya ini? Karena masyarakat Siak nggak merasakan ini. Jadi, kita minta, mana uangnya? Hasil-hasilnya mana? Ke mana dipergunakan? Yang dia jelaskan cuman 78 miliar. Ini nanti kita koreksi juga, kita minta, mana duitnya, mana bangunannya. Ini hal kecil saja, belum yang dari 40 ribu barrel itu, itu gede uangnya.

Hari ini saja, dengan *cost recovery* masih menerima 100 miliar lebih mereka. Kalau *cost recovery*-nya dibalikkan, jumlahnya kalau nggak salah kemarin disampaikan ke saya dengan Pak Rudi, ada 140 miliar per bulan dengan *cost recovery* tapi, makanya saya butuh, Pak. Itu paling kecil 8 ribu per hari ini hari. Nah, kalau dia dari 2002 sampai hari ini, mana uangnya? Mana teknologi yang dibuat? Ini uang berputar-putar di pusaran itu aja. Dulu sudah ada kasus BUMD 80 miliar hilang uangnya. Ada kasusnya itu di Riau, mau buat pelabuhan, apa pun tak jadi. 80 miliar uangnya, hilang.

Jadi, saya minta Pimpinan, kita tinjau ulang, kita minta batalkan ini, perpanjangan ini. Kita minta SKK meninjau ulang, Pak. Nah, ini kan SKK sebelum Pak Kepala ini yang sekarang, dan tim-timnya, kita minta tinjau ulang. Pak Dirjen, saya minta tinjau ulang. Sama dengan ini apa ini Pak, camar kemarin, nah sama ini. Kan iya kan, Pak? Terakhir kan kita minta itu dilelang iya kan? dilelang. Nah siapa yang dapat, itu secara profesional. Secara profesional, punya kemampuan, punya finansial, punya teknologi, punya seluruhnya, baru kita yakin.

Coba Bapak *assessment* ini semua pegawainya apa ini, BSP ini, ada nggak keahlian minyaknya? Paling yang kerja dari awal di situ sampai sekarang, cuman itu doang. Tapi dibawa ke teknologi nggak akan ada yang bisa jawab gitu. Saya yakin 100%, kalau kita bicara teknologi hari ini, nggak akan ada yang bisa jawab itu pegawai BSP. Nah, tapi bukan begini Pak caranya, gitu loh. Saya setuju pengelolaannya di sekolah daerah sekian persen, tapi didampingi juga secara teknologi. Harus ada pendampingan perusahaan daerah itu dengan perusahaan-perusahaan mana pun terserah, yang penting mempunyai teknologi yang canggih, gitu. Jadi berhasil, Pak.

Nah, dan saya minta, semua putra-putra, putri yang di Riau, itu disekolahkan ke luar negeri, ke perminyakan. Saya minta juga Rokan itu harus membuat beasiswa menyekolahkan anak Riau itu ke luar. Ke mana negara paling bagus perminyakannya, itu disekolahkan ke sana gitu, tentang teknologi dan mesin-mesin yang canggih-canggih itu, gitu. Jadi pulang, pengelolaan Riau ini sudah dirasakan anak-anak dan putra-putri Riau. Saya setuju di situ, bukan dinikmati sekelompok seperti ini yang duitnya nggak tahu ke mana sampai hari ini.

Tolong jelaskan, bawa laporan keuangannya. Kita minta audit investigasi ini. Kita, Pimpinan, kirimkan surat ke BPKRI, mungkin SKK sudah ya Pak ya? Izin Pak Kepala? Oh udah, mungkin tinggal dari Pimpinan Komisi VII ke Pimpinan DPR mengirimkan segera, apa, mungkin sudah juga itu waktu itu saya minta. Jadi saya minta seperti itu Pimpinan, sementara.

Jadi, saya minta ini kita serahkan kepada negara, negara lelang, tapi pembagiannya ke Siak, didampingi secara profesional dengan lembaga apa pun silakan, tapi didampingi juga dengan perusahaan teknologi yang baik, supaya Kabupaten Siak itu berdiri secara profesional. Nah gitu, dan mengangkat dan mengangkat derajat martabat putra-putri Siak supaya menjadi orang perminyakan. Bukan seperti sekarang, hanya bupati dan anak bupati, keluarga bupati, sekawan bupati, itu saja. Nah saya nggak setuju di situ. Saya minta Gubernur Riau juga bisa melaksanakan nanti kontrak Rokan itu seperti itu. Jadi, putra-putri Riau itu harus sekolah perminyakan, nah gitu. Jadi, saya minta di situ.

Untuk sementara itu dulu Pimpinan, mungkin nanti ada pendalaman tambahan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik.

Ini Pak Nasir luar biasa. Soalnya BOB ini sudah lama ini di dalam. Saya dulu masih inget soalnya.

Selanjutnya Pak Tifatul, Fraksi Keadilan Sejahtera.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera.

Yang saya hormati Pak Ketua dan semua anggota yang hadir fisik maupun secara *virtual*,

Juga di sini ada Pak Dirjen ya, Dirjen Migas, sama Kepala SKK, apa, Siak Pusako tadi apa? BSP ya? Bumi Siak Pusako ya.

Saya agak berbeda sedikit Pak Ketua.

Pertama saya ke BSP ini apresiasi dulu, karena saya baca di Majalah Top Bisnis ya? Merupakan BUMD yang terbaiklah ya. Ibu saya sebetulnya orang Melayu ya, tergolong Melayulah gitu, dan saya memimpikan sebetulnya sama dengan Pak Nasir tadi, mengimpikan orang Melayu ini maju gitu, Pak. Dulu-dulu kan tahun 70-an kayaknya Orang Melayu ini nggak bisa maju, gitu, termasuk Malaysia sendiri. Tapi lama-lama mereka berbenah, dan mereka membuat apa, sistem, bahkan kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang Petronas itu dulu kan belajar ke sini, ke Pertamina kan? Tapi kalau kita lihat,..(*suara tidak jelas*)..nya Petronas jauh Pak ke manca negara operasionalnya dan sebagainya.

Jadi, terus terang saya, walaupun ini, sebenarnya bangga ya kalau ada Melayu maju gitu, yang kata orang Melayu *nggak* bisa maju, Pak, gitu. Nah, cuma betul kata Pak Nasir tadi. Pak Nasir ini, beliau di Riau ya, Dapilnya Riau 2 dan kita juga merasakan kalau di sana itu, walaupun saya diletakkan di Sumatera Utara. Misalnya ada 3 Gubernur Riau terakhir itu Pak, itu jadi pasien KPK ya tiga-tiganya Pak Nasir ya? Mulai dari Saleh Yazid, Rusli Zainal, Annas Ma'amun ya? Gitu. Jadi, termasuk juga Sumut, gitu. Saya kadang-kadang berpikir, apa yang salah ya dengan apa kita ini, dengan Melayu nih? Kenapa nggak bisa profesional gitu ya, terus *auditable*, kemudian juga ya, untungnya besar ya. Jadi, padahal kita kepingin seperti itu.

Nah, waktu ada kunjungan ke Riau juga, saya mendengar bisik-bisik ini, bisik-bisik soal bahwa hasil ya BSP ini banyak juga diapakan, dimanfaatkanlah dalam tanda kutip oleh orang-orang yang dekat sama pusat kekuasaan saja,

maksudnya di Siak itu. Siak ini kan punya sejarah, Pak, dia ini kerajaan dulu nih Pak Nasir ya? Iya. Jadi, ini apa, kita ingin profesional, Melayu itu bisa profesional. Dulu Malaysia yang kata orang Melayu juga *teruk* sangat ya, tapi mereka buat sistemnya, mereka benahi, mereka bisa maju gitu.

Nah, harapan saya ke Bumi Siak Pusako ini, ini BUMD, Pak ya? termasuk BUMD Pak ya? Bisa *nggak* menularkan profesionalitas ini ke juga kepada BUMD yang lain gitu. Riau ini memang, ya saya kadang-kadang kasihan lihat Pak Nasir ini ya, bawahnya minyak, atasnya minyak, tapi Pak Nasir ini kering saja tengok dari dulu gitu. Jadi, ini salahnya di mana ini? Kok apa, berat. Ndak ini di masyarakat ini Pak Nasir, ya itu kan kata-kata ibarat. Ya penduduk itu *nggak* sejahtera-sejahtera gitu dari dulu itu kalau kita lihat ke bawah-bawah situ ya.

Jadi, sekali lagi itu harapan saya, dan saya berharap sekali kepada Pak Dirjen ini dan juga Pak Kepala SKK Migas, tolong dibantu deh ini masalah ini Pak, masalah apa, profesionalitas daripada pengelolaan ini. Sayang juga ini. Ini kan kalau kita lihat..(*suara tidak jelas*)..nya dan *forecast* apanya nih, produknya ini ya, sampai tahun 2042 ini Pak, sampai yang hampir visi 2045 100 tahun merdeka ini Pak. Luar biasa ini kalau ini jalan ya sesuai dengan harapan ini dan sekarang kan lagi, kalau kita lihat di sini lagi nanjak-nanjak ini Pak ya. Nah, ini kita berharap profesionalitas ini bisa. Ini apa ini yang ini? Oh tahunnya, oh iya tahun sekarang ya? Ya, tapi kan ini ada harapan. Kan harapan ini kan membawa optimisme ya Pak Dirjen ya. Kalau *nggak* ada harapan itu kan bertepuk sebelah tangan ya kita kan, gitu. Jadi, kalau ada dikedipin juga dari sana, *awak* juga semangat ini ya.

Jadi itu, mohon ke Pak Dwi juga sudah berpengalaman, Pak Dirjen dan lain. Saya pikir ini apa sih, ya ini nih ini saya lihat persoalan makro. Kenapa Malaysia sama-sama Melayu juga, ini bisa maju gitu loh. Sistemnya jalan, kemudian pengembangan mereka jalan dan luar biasa, apa, padahal negara mereka itu lebih kecil dari kita.

Itu saja Pak Ketua harapan saya, dan juga mungkin nanti kepada BSP mengenai harapan bagaimana juga ini bisa ditularkan ke BUMD-BUMD yang lain. Itu saja.

Terima kasih, Pak.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ini luar biasa, dua-dua ini orang Melayu, kan? Iya. Cuma saya agak aneh juga jadi, tapi ntar giliran saya saja. Jadi dulu kita ingat waktu 2018, itu Pertamina ingin mempertahankan, bahkan cenderung negatif terhadap BOB Siak dulu kan. Dulu kan dia bilang kurang dana kan, saya ikut soalnya kan, tapi gitu lihat kronologis yang dipaparkan Pak Dirjen di sini, Pertamina tidak bersedia memperbaiki. Jadi, kayak memberikan jalan kepada PT Bumi Siak Pusako. Karena dulu ini BOB ini kan 50% punya BSP, BSP itu terdiri dari pemda kabupaten dan pemda provinsi dan 50% punya PHE, tapi pasca entar tanggal 9, entar 100% punya BOB. Ini yang cukup unik, entar giliran saya yang akan mendalami.

Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Fraksi PAN, Pak Nasril *monggo*, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, anggota Komisi VII yang kami hormati,
Pak Dirjen,
Pak Kepala SKK Migas,
Direktur Pertamina Hulu dan Hulu Rokan, dan BSP Bumi Siak.

Pertama saya memberikan apresiasi terhadap BUMD yang mampu melakukan ya, akuisisi total namanya itu ya, mengambil alih pengelolaan secara total, sehingga BOB dengan Pertamina Hulu ini berubah, sehingga penguasaan penuh oleh BSP Siak, betul ya Pak Dirut ya? Itu keberanian BUMD yang saya berikan apresiasi.

Yang kedua, sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan kepada Pertamina Hulu dulu ya, yang mempunyai *participating interest*-nya 50%. Pertanyaan pertama itu, kenapa Anda tidak mampu mengikuti peningkatan nilai KKP? Apa *reasoning*-nya sehingga BSP berani ya, berani mengambil angka yang ditawarkan oleh SKK Migas? Itu dulu. Pertanyaan itu saya pikir perlu data ya, perlu beberapa *reasoning*, sehingga meyakinkan Komisi VII, benar, layak untuk dikelola oleh BSP Siak. Karena yang kami tahu bahwa, Pertamina ini kan ya cukup sepuh ya, cukup tua, cukup pengalaman dan cukup punya teknologi dan sebagainya. Nah kenapa ini terjadi, sehingga menjadikan sebuah keputusan oleh pemerintah pusat ya, untuk memberikan sepenuhnya kepada BSP Siak. Artinya apa? Kalau memang *reasoning* Pertamina Hulu itu masuk di akal ya, mungkin kita bisa melepaskan dan memberikan *support* kepada BSP Siak, tapi kalau memang tidak masuk akal, berarti ada sesuatu di belakang ini yang mengakibatkan 100% dikelola oleh Bumi Siak Pusako. Saya berharap ya, data dan beberapa hal yang harus bisa meyakinkan kita bahwa ini diberikan kepada BSP Siak ini akan menambah nilai, *volume*, bahkan juga kontribusi

kepada daerah dan negara. Ini dulu Pak, ini yang mendasar kepada Pertamina Hulu.

Dan selanjutnya kepada SKK Migas ya, SKK Migas. Sejauhmana evaluasinya Pak, secara komprehensif Pak Dwi ya, terhadap pengelolaannya, target berapa sesungguhnya di tahun 2002 itu ya, di tahun 2002 itu berapa *volume* yang diharapkan terhadap deposit kandungan yang ada di lapangan. Nah, ini kan terjadi diskresi penurunan produksi. Nah, berapa sesungguhnya target itu ditetapkan? Kalau yang disampaikan oleh Bung Nasir tadi bahwa dengan kata di sini 2012, ini sudah 15 ribu, kenapa penurunan itu cukup signifikan di 8 tahun.

Nah, angka-angka itu ya, ini kan angka-angka yang akan menunjukkan kenapa terjadi penandatanganan kontrak ulang, perpanjangan kontrak oleh SKK Migas, kan ada kajian. Kajian yang menunjukkan bahwa lapangan ini ada apa. Nah, ini sesungguhnya yang akan ditawarkan kepada Komisi VII, ini loh Pak, inilah Pak DPR, bahwasanya penurunan produksi ya, dan juga pengeluaran *cost recovery*-nya, ini yang terjadi. Wajar saya pikir Saudara Nasir tadi meminta audit khusus untuk tujuan khusus dan itu memastikan bahwa, saya pikir aturan di SKK Migas pasti ada, bahwa apa di SKK Migas pasti ada. Setiap perpanjangan kontrak pasti ada audit dulu, pasti ada audit. Apalagi orang yang sama, orang yang sama untuk melakukan perpanjangan. Ini kan juga termaktub di apakah di Undang-Undang Investasi ya, bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Meskipun kontrak, kontrak kita ada 100 tahun, tetapi per 35 tahun, per 30 tahun itu ada audit, ada audit.

Nah ini audit inilah sesungguhnya saya mau respon dan memberikan dukungan kepada Saudara Nasir untuk diaudit dulu, baru hasil audit ini yang akan ditawarkan. Jadi, menyakinkan DPR ini kan juga tidak mudah, Pak ya. Kita butuh data, butuh fakta yang terjadi, terhadap kesinambungan daripada lapangan ini, CPP ini.

Dan yang terakhir tentunya kepada Pak Dirjen ya. Tolong kami diberikan angka ya, *reasoning* terhadap nilai KKP harus 130 juta, sehingga ketidakmampuan Pertamina Hulu untuk melakukan BOB bersama lagi. Kenapa angka ini muncul 130? Kan ini kan, ya saya malu juga Pak. Seakan-akan Pertamina Hulu ini KO, kan begitu, KO. Malu juga kita Pertamina KO dengan BSP Siak. Nah, ini sesungguhnya kami minta dasar penetapan angka 130 juta ini.

Saya pikir itu, dan saya mendukung untuk, meskipun ini sudah ditandatangani ya, perlu kiranya kesimpulan rapat itu ya, meminta BPK untuk melakukan audit khusus tujuan tertentu ya, karena ada perpanjangan. Itu perintah undang-undang juga karena ada perpanjangan, kita minta audit khusus. Kalau ada hal-hal yang menyangkut persoalan hukum di belakang, itu demi hukum itu batal perpanjangan. Saya pikir itu pemikiran saya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik. Saya pikir pemikiran Pak Nasril sama seperti saya. Saya membaca kronologis ini Pak, Pak Dirjen, saya membaca kronologis yang ada di paparan Pak Dirjen, berbeda sekali dengan ini kunjungan kami 2018. Di sini tanggal 13 sampai 15 Maret 2018. Saya salah satu orang yang ikut dulu kan. Dulu begitu getolnya Pertamina ingin mempertahankan dan me-*lobby* Komisi VII untuk ikut meyakinkan itu tetap di bawah Pertamina. Bahkan saya sedikit bacakan ini kesimpulan kita waktu kunjungan Komisi VII ya.

Dulu terakhir itu *lifting* yang dihasilkan itu sisa 11 ribu barrel per hari kan tahun 2017. Ada paparannya Pak semua. Dan itu, mereka menyatakan bahwa ini kan BOB Siak ini kan terdiri dari 50% punya Pertamina, 50% punya BOB Siak. Dan BOB Siak ini terdiri dari dua saham lagi, pemprov dan pemkab. Waktu itu ada kendala kekurangan gas kalau *nggak* salah kan. Mereka diajak patungan *enggak* bisa gitu loh. BOB. waktu itu sih inget saya kan. Terus kendala juga ingin menaikkan *lifting*, kendalanya di LHK, ini sampai dibuat Pak, kan.

Terkait kementerian, eh apa namanya nih, Kementerian LHK terkait penyelesaian izin AMDAL, penyusunan AMDAL BOB Siak Pertamina hulu, agar kemampuan produksi WK CPP bisa meningkat melalui ini. Kita minta supaya Komisi VII membantu. Terus kedua, Dirjen Migas, Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina terkait kelanjutan pengelolaan WK CPP dengan model yang saat ini memberi kesempatan kepada, dan Pertamina lah maksudnya kan, kesempatan kepada PT Bumi Siak Riau dan BUMD milik Riau dan Pemkab Siak, berikut konsekuensi finansial dan aspek lainnya bagi kedua belah pihak kan.

Jadi waktu itu, jadi apa yang disampaikan Pak Nasril itu betul. Saya merasa aneh karena ini di dua rapat, tapi berbeda nuansanya. Dulu Pertamina pengen pertahankan dengan mengeluh ke kami bahwa BOB ini *nggak* ada uang. Mau bikin jalur tol untuk gas *nggak* bisa. Ingat saya. Bahkan kandungan yang mau ini, minyak yang di apa, yang diprediksi itu ada di bawah, kalau *nggak* salah di bawah danau waktu itu, tapi LHK tidak berikan izin kan. Nah tapi kami, saya terutama ya, saya kaget ketika sekarang ngeliat kronologisnya Pertamina kaya, sampai kalah semua ini.

Ditawar 130 juta US kan, terus proposal yang disampaikan Pertamina jauh di bawah, ini Pertamina perusahaan besar loh Pak, perusahaan andalan Indonesia. Bahkan dulu Petronas belajar ke Indonesia. Ini membuat saya sangat unik. Bukan saya mengecilkan BOB Siak, bukan, tapi dalam artian, kenapa begitu dulu semangatnya Pertamina ingin memperpanjang,

mempertahankan BOB ini, eksplorasi di Siak ini, tiba-tiba begitu *letoy* di sini, *nggak* bersemangat, nawar pun lemah. Dan tiba-tiba begitu hebatnya BOB Siak ini, tiba-tiba punya kemampuan finansial yang luar biasa. Dulu DPRD-nya aja sulit ya.

Yang namanya penyertaan modal di daerah itu ada per-nya ini. Kami dulu ada bupati, ada Ketua DPRD waktu itu, masih ada foto-fotonya ya. Yang kami maksud perlu ada keterbukaan, siapa BOB Siak Pusako ini? Berapa skema saham yang dimiliki pemda sebenarnya? Karena banyak pemain, itu mainnya di BUMD, nitip di sana.

Dulu dirut, saya saja dulu, Dirut sebelum Bapak, Bumi Siak Pusako yang lama, saya saja dikenalin pengusaha, pengusaha Jakarta. Jadi disampaikan bahwa ini dirut orang kita. Loh gimana ceritanya? Kok bisa ini BUMD tapi yang ngendalikan orang Jakarta? Gitu loh. Ini buat diketahui juga masyarakat Siak. Jangan sampai ini jadi semacam cangkang, kan. Kita perlu keterbukaan, BOB Siak Pusako ini siapa? Berapa saham pemda, kan? Berapa partisipasi saham dari luar? Ntar akan ketahuan pemiliknya Pak. Sebelum saya, saya sendiri, Pak.

Dulu dirut yang lama itu orangnya pengusaha Jakarta, gitu. Jadi, di BUMD itu harus jelas, harus *clear*. Ini tiba-tiba Pak Buyung, Pak ini, ntar suatu ketika paling, sekarang harus melihat kan, entar ke depan berapa bulan lagi nih? 7 bulan lagi, eh 6 bulan lagi. Yang dulu susah payah pindah dari Chevron ke Pertamina ya, dulu kan? Terus tiba-tiba sekarang ntar 100%. Bukan kita meragukan BOB Siak, tapi kita harus ada transparansi terkait pengalihannya, Pak. Dulu SKK-nya siapa kan, ini siapa, dulu prosesnya gimana? Karena ini agak unik soalnya. Dulu ini sempat bertengkar antara DPRD ini pemdanya kan, gitu. Bahkan kepemilikan saham 10% dulu itu kan. Ada berbeda-beda soalnya. Pemprovnya, entah pemprovnya saya lupa. Pemprovnya lebih besar atau pemda eh pemkabnya gitu.

Jadi, menurut kami Pak, ini perlu ada keterbukaan. Bagaimanapun ini kekayaan negara dan seperti Pasal 33, bahwa bumi, tanah dan air itu dikuasai negara, dan dipergunakan semaksimalnya-maksimalnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi, menurut saya transparansi BOB Siak-nya inilah yang perlu kita buka dan harus jelas berapa sahamnya mereka kan, berapa kepemilikannya. Jangan juga mudah-mudahan Pak Dirut juga benar-benar ditunjuk oleh pemilik saham, bukan ditunjuk oleh pemegang-pemegang saham *invisible hand* yang ada di luaran, gitu.

Itu menurut saya.

Mungkin selanjutnya dari Fraksi PDIP ya yang di apa, *virtual*. Pak Julian Gunhar?

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Ini lagi masuk Ketua, di *break* dulu, satu menit sudah sampai, di *break* dulu, lompat dulu yang lain langsung.

KETUA RAPAT :

Oh Pak Yulian Gunhar, enggak. Selanjutnya Bu Andi Yuliani Paris.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Satu menit masuk.

KETUA RAPAT :

Nggak bisa, entar aja.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Iya, terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Bambang dan Seluruh teman-teman yang hadir, sahabat Komisi VII yang hadir di ruang ya.

Jadi karena pembagian, jadi kita *zoom* saja Pak Ketua.

Jadi, pertama saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman yang telah menyampaikan sebelumnya. Jadi, memang banyak catatan-catatan yang menjadi perhatian dari SKK Migas dan juga Pak Dirjen Migas. Nah, saya ingin bertanya secara umum dulu ya. Bagaimana sih sebenarnya prosedur ketika misalnya yang di dapil saya nih Pak, terkait misalnya bagaimana penguatan BUMD. Saya walaupun mungkin ada temuan BUMD yang dalam tanda kutip yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi abal-abal, tapi saya banyak menemukan ya memang BUMD yang benar-benar, yang kami perjuangkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena mereka harus bisa menikmati sumber daya alam yang ada di daerahnya.

Nah, proses misalnya Blok Sebuku Pak, di Sulawesi Barat yang merupakan dapil saya pertama kali saya menjadi Anggota DPR. Ini bayangkan untuk memperjuangkan *participating interest*-nya saja dari 2015 sampai hari ini nggak selesai-selesai gitu. Sekaligus ini saya minta nanti kita buka apa sih sebenarnya masalahnya, sehingga ketika kita melakukan revisi Undang-Undang Migas, di mana banyak sekali perizinan-perizinan yang di Kementerian ESDM saja banyak sekali pintunya, kemudian Kementerian ESDM baru-baru ini juga melakukan revisi terkait dengan permen, ini membuat kebingungan-kebingungan.

Padahal di lain pihak kita ingin meningkatkan *lifting* kita, kita ingin mengajak masyarakat atau dunia luar, investor, untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Tapi kalau misalnya aturannya tidak jelas, terlalu lama, bayangkan dari 2015 sampai 2021, ataupun misalnya dari seperti yang di Wajo, bertahun-tahun surat diajukan ke SKK Migas tapi ternyata tidak direspon, ketika saya turun baru direspon, ini kan kasihan Pak. Padahal kan sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar Pasal 33 bahwa kita harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ini catatan saya pak. Jadi bagaimana kita buat sistem bisa mengekselarasi semua perizinan-perizinan ya yang bisa, mungkin dari 2015 sampai 2022 ini nggak selesai-selesai, atau surat yang *mandek* ya, mungkin mekanisme itu perlu diperbaiki di SKK Migas maupun di Kementerian ESDM.

Kemudian ketiga, saya ingat Pak Bambang, Pak Ketua, waktu kami pertama kali di Komisi VII di periode yang lalu, kita pernah rapat khusus tentang *cost recovery* ya. Nah, mungkin kita juga perlu data terkait dengan *cost recovery*. Memang kita selalu mengundang 15 K3S yang besar-besar, tapi kita juga perlu data dari semua K3S yang beroperasi di Indonesia.

Itu mungkin catatan saya Pak Ketua, umum saja, yang detail-detail mungkin Pak Nasir sudah tahu ya apalagi terkait dengan dapilnya, misalnya di Siak ya dan lain-lain.

Demikian Pak Ketua.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Waalaiikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Karena, tadi sebenarnya nggak mau kita kasih kalau ini, tapi karena larangan tersebut *virtual*, akhirnya dia datang secara fisik. Kita berikan kesempatan kepada Pak Gunhar, daripada dia ini, ini dia datang menyaksikan kehadiran *virtual*-nya, di *virtual* pasti ada juga ini.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Baiklah.

Terima kasih.

Saudara Pimpinan,

Rekan-rekan sekalian,
Yang kami hormati Bapak Dirjen Migas,
Bapak Direktur Hulu Migas,
Bapak Kepala SKK Migas dan beserta jajaran yang hadir pada sore hari ini.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan Pak, aspirasi daerah pemilihan saya. Mungkin Bapak pernah dengar Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin ini kabupaten yang terkaya di Sumatera Selatan. Saya matiin dulu. Di daerah pemilihan saya ini Pak, marak sekali illegal *drilling*. Illegal *drilling* yang tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Kecamatan Babat Toman, Sanga Desa, Batanghari Leko, Keluang, Plakat Tinggi, Tungkal Jaya, Bayung Lencir. Illegal *drilling* ini Pak sepertinya tidak tersentuh aparat, yang pertama.

Kedua, kerja sama antara BUMD Petro Muba dengan pihak Pertamina ini tidak mendapatkan manfaat buat BUMD Petro Muba sendiri. Kenapa? Karena sumur-sumur yang dikelola ex Belanda atau sumur-sumur *ex marginal* katanya, itu jumlah yang ada dalam perjanjian dengan Pertamina, dengan jumlah yang riil di lapangan itu jauh, Pak. Jadi, sepertinya, kerja, pola kerja sama antara BUMD Petro Muba dengan Pertamina ini hanya sebagai tameng aja. Jadi, kalau dia BUMD Petro Muba dengan Pertamina ini, BUMD Petro Muba mendapat izin mengelola sumur ex Belanda sebanyak 565 sumur ya, ini yang resmi, resmi, tetapi di lapangan, itu bisa lebih dari 1.000 sumur Pak, lebih dari 1.000 sumur. Nah, yang lebih dari 1.000 sumur ini Pak, dikelola oleh kelompok atau perorangan. Jadi, PAD yang didapat oleh BUMD Petro Muba ini tidak sesuai dengan jumlah yang terjadi di dalam pelaksanaan operasinya gitu, Pak.

Saya contohkan. Dari 565 sumur ini mungkin produksinya itu tidak sampai 5.000 atau 4.000 barrel per hari, contoh ya, tetapi di lapangan-lapangan lain itu bisa sampai 10.000, bisa sampai 10.000 ini ya. Yang dilaporkan, yang dilaporkan oleh para penambang-penambang illegal *drilling* ini yang 565 sumur ex Belanda ini dengan jumlah produksi yang sangat kecil, tetapi yang di luar itu, itu sudah ribuan Pak. Mungkin Bapak sering lihat di media, ada yang meledak terbakar ya kan, terus kalau Bapak main ke lokasi, ini kaya tempat-tempat pengolahan narkoba gitu Pak, kaya di film-film itu ya. Jadi, tempatnya tertutup, dikemas dengan begitu baik, dan ini pun melibatkan oknum-oknum.

Kita melihat itu, belum ada upaya untuk penertiban pertama. Kedua, pola kerja samanya ini harus ditinjau ulang, ditinjau kembali dalam skema yang baru. Nah, ini kebetulan kepala daerahnya ini orang PDI ya. Jadi, hasil kunjungan Pak, hasil kunjungan mereka ke kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro Pak ya, ya, iya Jawa Timur. Enggak, ini hasil kunjungan, mereka belajar, belajar ke Kabupaten Bojonegoro, pola BUMD di sana Pak itu sangat baik, sangat baik meningkatkan PAD ya kan, dan mampu memberikan manfaat buat daerah.

Nah di dapil kita ini, ini yang kayak kartelnya Pak. Perusahaannya nggak naik-naik, PAD nggak dapet, tapi kartelnya kayak-kayak, begitu. Ya kita urusan-urusan begini kan di lapangan kita pahami, ya kan. Tidak ada tindakan, tidak ada penertiban. SKK sendiri ataupun dari pihak pemerintah sendiri tidak ada upaya untuk, coba sih kita duduk bareng lagi. Ini bupatinya nunggu ya kan. Sudah kita kirim surat tapi suratnya nggak dibales, sudah kita ajukan semacam permohonan untuk kembali sama-sama duduk belajar dengan Bojonegoro juga nggak terbuka ruangnya, seperti itu.

Pada kesempatan ini, tadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan juga Bumi Pusako Siak. Ini kasusnya nggak beda-beda menurut saya Pak, nggak beda-beda. Ya ini memang harus kembali kita tertibkan sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau memungkinkan, Kabupaten Musi Banyuasin, dapil saya ini, dia sangat kepingin sistem pengelolaan BUMD Petro Muba ini sama dengan Kabupaten Bojonegoro. Ini yang kepingen mereka, Pak, aspirasi dari daerah pemilihan saya.

Terus penambang-penambang ilegal *drilling* ini, Pak, harus ditertibkan Pak, harus. Memang dari SKK ataupun Diren Migas ini nggak bisa nahan orang kan, susah juga kita. Kalau perlu Pak, memang harus bekerja sama dengan Mabes Polri. Ini sudah berapa kali? Ditangkep, ada korban, terus nanti hilang satu minggu, dua minggu, hidup lagi iya kan, terus tutup lagi, nanti hidup lagi. Nah, keinginan masyarakat juga penambang-penambang ilegal ini, ya kan berkaitan dengan khalayak hidup masyarakat juga. Kalau ini diresmikan, disah, diurus dengan benar, mereka siap, mereka mau, tetapi sepertinya ada pembiaran. Ini biar *nggak* benar, ini benar, yang ini cuma sekedar stempelnya aja sebagai landasannya saja “wah ini benar pak”, padahal di lapangannya nggak benar.

Jadi Pimpinan, pada kesempatan ini, kami minta kepada Kepala SKK Migas, Pak Dirjen Migas ya, untuk menjadi perhatian. Nanti setelah rapat saya minta waktu sebentar, mungkin bisa disampaikan secara lisan, nggak, berkaitan dengan waktu dan tempat ya. Karena Pak Bupati juga menunggu. Sampai saat ini belum ada jawaban dari SKK Migas ataupun dari Dirjen Migas untuk membahas masalah ini.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebenarnya persoalan ini banyak ya Pak ya. Saya sendiri dititipin oleh keluarga kakek saya itu. Yang, kami ini keturunan dari apa namanya, dari

Bangkalan, Pak. Jadi, di sana itu ada WMO. Kyai-kyai pada telepon saya, Pak”, saya kan pernah cerita. “Kami ini yang punya gas” kan katanya kan. Ini untung orang Madura lagi sabar-sabar Pak kan. “Kami ini cuma dilewatin saja” katanya. “Gasnya dari kami, jangan kami hasilnya” katanya, sampai sekarang hasilnya pun enggak dibagi pemdanya kan. Lewat iya, dari Sumenep, lewat juga Bangkalan kan, yang di Bangkalan juga sama. Sumurnya di Bangkalan, tapi penggunaanya di Gresik kan. Orang sana Pak kasihan Pak, kan. Gas dari sana, minimal jargaslah di situ.

Saya sudah ingetin Pertamina, jangan sampai, orang sana itu baik-baik Pak, tapi kalau sudah ngamuk, entar didudukin itu semua itu kan. Jadi, kyai-kyai itu sudah pada mulai ini. Saya sama bupatinya kan, saya diskusi, mohon diberikan ini supaya ada ruang komunikasi dengan Pertamina maupun SKK kan. Kepala SKK Jawa Timur juga itu Putra Bangkalan, eh *sorry*, Putra Sumenep kan. Jadi, kita berharap bahwa Pertamina, ini hal-hal semacam ini, dengan pemerintah daerah harus bisa minimal efeknyalah Pak kan. Memang kekayaan alam itu dikuasai negara, tapi ya jangan lewat saja gitu loh. Di sana jargas dua biji aja *nggak* ada Pak kan, tapi gasnya yang dinikmati di industri di Jawa Timur itu semua dari Bangkalan. Bahkan sekarang udah mulai katanya malah ngebor baru lagi, gitu loh.

Mungkin itu, Pak Ramson mungkin ingin menambahkan? Oh Pak Ramson. Jadi itu Pak Dirut Bumi Siak Pusako, harus dijelaskan itu. Perlu ada kejelasan Pak, mungkin Pak Dwi, karena Pak Dwi kan Kepala SKK pasca penetapan ini ya Pak ya, sebelumnya ya Pak kan. Sebelumnya yang Kepala SKK sebelumnya. Nah, jadi prosesnya itulah yang harus kita evaluasi. Karena berbeda dengan kami 2018 kondisinya gitu loh. Yang dulu Bumi Siak Pusako sama Pertamina, ya kita bisa bilanglah, teman tapi *nggak* mesra dulu. Tiba-tiba *nggak* tau ada angin apa, ada tiupan dari siapa, Pertamina jadi letoy, bahkan menyerahkan 100%.

Nah, kita ingin tahu apa sih Bumi Siak Pusako dari sisi finansialnya. Karena waktu itu sempat kita singgung waktu kunjungan itu, waktu Maret 2018 itu. Peralatannya, kemampuan finansialnya, kok tiba-tiba begitu dahsyat, jangan sampai. Nah, itu perlu keterbukaan PT Bumi Siak Pusako kan. Siapa sih ini? Apa murni *full* BUMD 100%? Dan keuangannya apakah sudah disetujui oleh DPRDnya kan? Karena Bumi Siak ini antara Provinsi sama Kabupaten ya kan, itu.

Jadi itu, kalau memang ini masih ranahnya abu-abu, toh masih ada beberapa bulan, Pak, masih bisa di-*review*, bisa ditinjau ulang. Jangan sampai dipasrahkan 100%, entar terbengkalai lagi Pak, kan. Apalagi semangat SKK untuk menaikkan *lifting* kan sudah sangat luar biasa waktu pasca, eh sebelum penetapan APBN kemarin. Kita sepakat untuk menaikkan *lifting* tahun 2022 kan? Dan terakhir BOB Siak ini produksinya hanya 11.000 barrel per hari kan. Kalau berdasarkan dulu waktu 2017 tuh, Pak, tahu sekarang, jangan-jangan

tinggal 8 mungkin. Iya segituan ya Pak? 2017 di kunjungan kami BOB ini hanya 11.000 barrel per hari.

Jadi ketika entar berubah kepada Bumi Siak, sedang kita tidak tahu kan, ini bukan hal main-main ini, kekayaan negara soalnya. Jangan sampai, kita bukan tidak percaya dengan BOB, tapi kita harus memastikan kan fasilitas dari semua aspek, finansial, teknologi. Apalagi kata Pak Nasir kan? Anak-anak Siak katanya jago-jago soal perminyakan kan, atau belum ya? Baru mau disekolahkan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Belum ada. Masa 20 tahun tidak melahirkan satu pun.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Tambahan, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Jadi itu, selanjutnya, oh masih ada dari nih, dari tokoh NU soalnya. Beliau ini Wakil Ketua.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Terima kasih Pimpinan Komisi VII, Lurah Bambang Haryadi. Karena beliau tadi mengantarkan dari Bangkalan, beliau itu lurah.

Yang saya hormati Kepala SKK Migas,
Yang saya hormati Dirjen Migas dan juga dari PHE, serta
Sahabat-sahabat Komisi VII.

Jadi, saya mengikuti juga dari *zoom*, dan keluhan, pertanyaan teman-teman juga sudah tersampaikan semua. Kita masih mempunyai harapan, dan kita masih selalu *husnudzon* kepada SKK Migas, bahwa mempunyai niat untuk meningkatkan *lifting*. Dan apa pun itu, kepercayaan diri SKK Migas itu ya kita dukung. Walaupun kadang juga meleset, tapi kita dukung, suhu Dwi Soetjipto. Iya, kita dukung beliau ini kan Waketum Apeksi, iya. Kita dukung gitu ya.

Nah, akan tetapi khusus untuk BOB Siak ini, konon katanya mau dijadikan *role model* yang sangat baik, yang sangat bagus, iya kan? Tetapi juga beberapa waktu yang lalu juga ada masalah korupsi juga di situ. Betul ya Pak Dirut ya? ada masalah korupsi beberapa waktu yang lalu yang diungkap? Iya. Artinya masih pernahlah terjadi hal seperti itu. Sehingga, ketika kita menginginkan keterbukaan yang diharapkan oleh sahabat-sahabat Komisi VII, mohon juga dijawab dengan baik, transparan, akuntabel, supaya *husnudzon-*

nya kita, dan harapannya dari SKK Migas untuk menaikkan *lifting* ini benar-benar menjadi kenyataan.

Tadi juga sudah disampaikan semuanya. Teman-teman tadi menyampaikan, di daerah-daerah juga masih terjadi hal-hal yang bermain ini adalah kartel, yang bermain adalah para mafia, dan itu kita tidak bisa menghindari, tapi meminimalisasikan harus bisa. Kalau tidak kita lakukan dari sekarang, maka kita tidak akan tahu *lifting* ini bisa naik apa tidak?

Jadi, harapan saya dari BOB Bumi Siak Pusako ini ya benar-benar transparan. Tadi Lurah Bambang tadi juga mengatakan masih ada waktu untuk kita saling duduk bersama, menjelaskan apa yang terjadi, sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai model untuk BUMD ini hanya sekedar model-modelan saja yang isinya balik lagi pada itu lagi, kartel lagi. Jadi, modelnya jadi ondel-ondel nanti Pak, hanya untuk *guyonan* saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, interupsi sedikit.

KETUA RAPAT :

Iya? Oh silakan Pak Ramson.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Saya melihat memang ada perkembangan yang unik, bahwa dulu 2018 PT Bumi Siak Pusako kan kapasitasnya agak kurang, sehingga PHE itu agak ragu kan. Nah, ini saya pikir perlu diskors 10 menit, supaya PT Bumi Siak Pusako menjelaskan siapa saja *financial*-nya, pemodalnya. Jadi, mungkin segan mengemukakan terbuka. Iya, jadi supaya jelas. Skors 10 menit, bisa diskusi hanya untuk data saja daripada harus terbuka. Sesudah itu baru dimulai lagi. Usul saja Pak Ketua.

Terima kasih.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin, tambahan dikit Pimpinan.

Mungkin sekalian menjelaskan penghasilan per tahunnya, Pak. Kita minta menjelaskan penghasilan per tahunnya, dijelaskan tambahannya. Nah, nanti auditnya itu, saya minta dari SKK, apakah dari BPK sudah kalau atau belum, kalau bisa nanti di kesimpulan juga kita minta Komisi VII nanti mengirimkan surat ke BPK untuk diaudit investigasi. Pertamina juga tadi, termasuk tadi itu, yang ada catatan-catatan yang menjadi catatan tadi itu termasuk ada biaya 2020 tadi. Saya agak aneh dengernya bahwa dia mau modalin 100% pembiayaan itu. Itu agak, kok Pertamina nggak ikut biayain gitu, apa itu masalahnya? Agak aneh gitu.

KETUA RAPAT :

Pak Dwi, Pak Dirjen, karena ini menyangkut mungkin ada hal teknis, bukan kita ingin ini, karena rapat ini rapat terbuka, ini bisa diakses semua masyarakat Indonesia Pak kan. Cuma karena ini terkait, kalau nggak salah ini ada aturan OJK ya? Kalau Pertamina kan saham negara kan, kalau ada swasta, kan kita *nggak* tahu ini di mana, di Bumi Siak Pusako ada saham swasta atau nggak?

Silakan, Pak.

DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO (Ir. ISKANDAR):

Tidak ada sama sekali Pak Pimpinan. 100% adalah pemerintah daerah dan provinsi. 5 tadi yang saya sampaikan yang terbesar adalah Kabupaten Siak. Tadi presentasi saya sudah jelas disampaikan ada *..(suara tidak jelas)..* 73%, 18% provinsi, sisanya adalah Kabupaten Kampar. Iya Pak, jadi semuanya ada pemerintah daerah ini BUMD murni, Pak.

Jadi, ini mungkin, satu lagi, kalau mengenai audit Pak. Jadi tolong dijelaskan juga, di-*clear*-kan, apakah di BOB atau di BSP, Pak? Kami diaudit oleh BPK, BPKP baru tahun kemarin 2021. Audit khusus boleh juga, malah untuk Rokan kami malah berjuang waktu itu. Kenapa bukan kami yang ambil Rokan itu, kata orang bilang. Tapi saat ini, ini bercampur antara BOB dan BSP gitu loh. Kalau kami *monggo*, kalau mau tahun 2021 sudah ada laporannya di perwakilan gitu. BOB juga sudah ada auditnya juga, setiap tahun SKK Migas juga ada di situ gitu loh. Jadi jangan bercampur seperti ini, jadi kami enggak bisa menjawabnya. Yang mana gitu yang perlu diapakan?

Satu lagi, tentu dengan misalnya tadi ada apa, berita-berita negatif itulah, kalau ini tidak ada, tidak ada, tidak ada, yang sekolah atau gimana. Saya dari 2002 di situ Pak dari awal, iya sampai.

KETUA RAPAT :

Pak, Sebentar Pak.

Jadi Pak Dirut.

DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO (Ir. ISKANDAR):

Iya Pak?

KETUA RAPAT :

Pak Dirut ini kan Bumi Siak Pusako.

DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO (Ir. ISKANDAR):

Iya.

KETUA RAPAT :

Kalau BOB ini kan dia gabungan antara PHE dan Bumi Siak Pusako. 7 bulan lagi Bumi Siak Pusako 100% ya kan? Penguasaan terhadap sumur-sumur di situ. Betul ya Pak Dwi ya kan. Nah yang kami pertanyakan, kalau tadi ditanyakan Bumi Siak Pusako *full* 100% pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten, maka yang terbesar Kabupaten Siak. Pertanyaan saya, pengerjaannya apakah melibatkan kontraktor?

Jadi, kayak dulu kan penguasanya adalah Pertamina, diberikan kepada BOB namanya. BOB itu gabungan karena harus melibatkan pemerintah daerah kan. Ada Bumi Siak Pusako *plus* Pertamina Hulu Energi. Nah, sekarang pemain utamanya, kalau dulu kan BSP ini jadi pemain cadanganlah ibaratnya, bergabung kan? JO kan dulu ya?

DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO (Ir. ISKANDAR):

Mohon maaf kita 50:50 sama, Pak. Saham kita dengan Pertamina sama. Jadi sama kuat kita, Pak, bukan pemain cadangan Pak, maaf. Memang kami belajar dari Pertamina, terima kasih, tapi saham kita sama, kekuatan sama, makanya kita ada *join management committee* itu, di situ itu. Jadi jangan sampai salah persepsi. Pertama juga saya, ini kan didengar semua orang ya Pak ya, jadi kami juga berharap semua yang disampaikan itu juga bisa dipertanggungjawabkan juga. Karena kami juga orang daerah Bapak-bapak. Pemegang saham kami bupati dan gubernur. Kami berkomunikasi dengan DPRD-DPRD kota dan kabupaten/kota provinsi gitu. Kalau memang ada silakan turun.

Kami sampaikan bahwa tadi kami 3 triliun lebih apa, PAD yang, eh apa bukan PAD, *deviden* yang kami dibagikan ke pemegang saham, apa itu dia tidak berarti? Terus CSR, kami sudah bangun sekolah, sudah menyekolahkan orang juga, itu kalau itu didalami bisa terlihat kok, Pak. BPK mendalami itu Pak, kami diperiksa setiap tahun adalah dari sisi keuangan, itu kalau di KAP kita ya, tapi BPK juga semuanya diaudit, Pak. Jadi silakan, tidak ada apa-apa. Cuma kami ingin negara juga di sini bisa menyamakan saham kami dengan, kami ikut sama, prosesnya sama dengan K3S lain yang 22 itu Pak. Jadi, kesalahan kami di mana gitu?

Waktu itu diverifikasi. Apakah yang lain juga diverifikasi? Nah, itu tadi Pak, kalau sama nggak apa-apa, kami ikut gitu, tapi jelasin, Pak.

Terima kasih.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya, silakan Pak Nasir.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

BOB ini kan Badan Operasi Bersama, berarti kan kalau diaudit, diaudit bersama, benar kan? Bukan diauditnya sendiri-sendiri. Auditnya kan, izin Pimpinan, mungkin saya interaktif dengan Kepala SKK. Benar, Pak, kalau saya salah coba nanti diluruskan. *Cost recovery*-nya pun dari pembiayaan mereka berdua baru dibagi kan Pak?

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Betul *sir*.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Benar kan?

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Iya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, berarti auditnya juga auditnya bersama, bukan sendiri-sendiri. Saya pun bingung tadi penjelasannya, kok sendiri-sendiri. Saya minta penghasilan BSP ini kita skors Pimpinan, disampaikan nanti dari 2002, penghasilan, ini jelas ya, penghasilan BSP dari 2002 ke 2021 tolong sampaikan berapa, sekalian ringkas dengan *cost recovery*-nya, nah kita minta ini. Jelas ya? Kamu siapkan saja.

DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO (Ir. ISKANDAR):

Pak, izin.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ndak usah kamu yang jawab dulu, kamu siapkan saja, karena rapatnya mau kami skors. Kita minta kamu jelaskan penghasilan 2002 sampai 2021, penghasilan BSP dan hasil *cost recovery*-nya. Itu saja. Kita minta izin, mungkin di-skors saja Pimpinan, perlu waktu itu sebentar.

KETUA RAPAT :

Baik, gini.

Jadi PT BSP ini, kita bersyukur bahwa BSP ke depan bisa bantu ikut mensejahterakan masyarakat Riau kan, karena bagaimanapun ini perusahaan daerah. Tapi kita juga harus, jangan apa namanya, harus *review*, harus meninjau juga. Apakah betul ini entar mutlak diberikan kepada masyarakat Riau? Jangan sampai entar ada pelibatan-pelibatan tangan lain kan, yang hanya menggunakan BSP sebagai *lead*-nya saja di depan, entar dia kontraktornya swasta lagi kan. Kalau murni kepada Pemerintah Riau, diwakili dalam hal ini BSP, kita sangat mendukung, tapi kalau entar pakai tangan-tangan lain, misalnya JO dengan kayak orang-orang lain, ya kita patut menduga bahwa memang BSP ini didorong hanya untuk menjadi tameng di depan, dan itu tidak akan menguntungkan masyarakat Riau, karena jauh lebih menguntungkan kepada investor tersebut. Jadi buat kami, untuk mengetahui lebih dalam saya sepakat kita skors 5 menit untuk kita diskusi sebentar, agar langsung habis itu kita langsung ke kesimpulan ya.

Baik.

Saya nyatakan skors 5 menit, 10 menit rapat kita lanjutkan pukul 16.30 WIB.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 16.20 WIB)
(SKORS RAPAT DICABUT)**

Setelah mendengar dan juga kita sama-sama melakukan skors dan melakukan sedikit tukar pikiran, dan *alhamdulillah* tadi Pak Kepala juga sudah menunaikan *shalat ashar*, Pak Dirjen juga, pikiran semakin tenang dan kita semua ikut mendengar apa yang sudah menjadi keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, karena juga mengingat waktu di dalam masa pandemi saat ini, kita ada ketentuan dari Pimpinan DPR bahwa rapat tidak boleh melebihi waktu-waktu tertentu. Maka itu kami menyepakati bahwa, apa yang dipertanyakan oleh teman-teman anggota Komisi VII dapat dijawab secara tertulis oleh Kepala SKK, Pak Dirjen maupun dari Pertamina Hulu Energi, serta juga Direktur Bumi Siak Pusako.

Dan untuk menyingkat waktu, kita persilakan sekretariat.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, sebelum di kesimpulan, titip pertanyaan untuk dijawab secara tertulis kepada PT Bumi Siak Pusako.

Pak Dirut, dari pemegang saham, dari Pemprov, Kabupaten Siak, Kampar, Palalawan, dan Pemko Pekanbaru ya, saya minta di-*breakdown*, di-*breakdown* terhadap berapa? Apakah murni itu 100% BUMD atau ada *share* saham swasta di situ. Nggak, saya minta tertulis saja, karena tertulis itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Dari masing-masing 5 pemegang saham tadi untuk di-*breakdown* dari masing-masing jumlah saham yang 9.960 tadi. Dan BUMD itu dinyatakan adalah pemegang saham 100% murni. Kalau tidak, adakah swasta lainnya atukah ada *share* yang lainnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik.

Itu sebagai tambahan pertanyaan ya untuk Pak Dirut PT Bumi Siak Pusako, mungkin langsung sekretariat kita tampilkan draf kesimpulan.

Oke, coba.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Dirjen Migas, Kementerian ESDMRI, Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi (Persero), Dirut PT Bumi Siak Pusako, Senin 14 Februari 2022 :

1. Komisi VII DPRRI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak wilayah kerja *Coastal Plains* Pekanbaru atau CPP pada PT Bumi Siak Pusako dan hasilnya dilaporkan pada Komisi VII DPRRI.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin, Pimpinan.

PT Bumi Siak Pusako ini bukannya, itu BOB harusnya. BOB, terus (Pertamina dan BSP) ini. Jadi BOB dulu, BOB. Oh ini, ini penunjukan yang, oh iya, iya, *oke, oke*.

KETUA RAPAT :

Bukan, ini yang, untuk yang tanggal 9, bulan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Tapi kalau bisa poin 1 dulu, ini jadi poin 2 saja, Pimpinan. Poin pertama, kita minta dulu audit yang investigasi itu kan sudah kita minta SKK ngirimkan ke BPK ini sekarang, sudah, sudah, izin, izin Pimpinan. Sudah Pak ya? Pak Kepala ya? Nah itu kalau bisa kita meminta hasil audit 2002 sampai 2021, audit BPK, audit investigasi BPK dan audit teknis dari dirjen. Jadi BPK sendiri, dirjen sendiri, SKK sendiri. Nah, jadi auditnya dulu kita minta ini, dan nanti baru poinnya, poin 1 ini jadi poin 2 Pimpinan, izin. Nah, jadi nanti baru, jangan tertulis, tapi kita jadwalkan ulang, Pimpinan. Nah, jawaban tertulis dan akan kita rapatkan kembali di Komisi VII. Mungkin, jadi 3 poin, jadi 3 poin. Nah, poin pertama tadi audit investigasi yang kita minta dilakukan SKK, terus audit BPKRI, dan audit teknis dari Dirjen Migas. Nah yang dilakukan, untuk, untuk mengaudit BOB tadi, BOB, yaitu, BOB itu Pertamina dan BSP tadi.

Nah, ini kan belum pernah diaudit ini dari 2002 sampai 2021 audit BPK-nya belum ada ini. Nah, jadi kita minta auditnya Pimpinan, nah.

KETUA RAPAT :

Pak Nasir, Kalau audit BPK itu pasti rutin ada. Apakah yang diminta itu audit PDTT? Kalau audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu bisa diminta, kalau audit keuangan itu sudah otomatis ter, awal tahun sudah pasti diaudit.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Saya sudah nanya ke SKK, ini *cost recovery*-nya saja nggak ada auditnya.

KETUA RAPAT :

Jadi itu tujuannya audit PDTT, dilakukan audit PDTT terkait *cost recovery*. Mungkin gitu ya Pak?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Cost Recovery dan pengelolaannya.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (IR. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., PH.D., IPU.):

Pimpinan,

Karena ini perpanjangan, dia harus PDTT, dengan tujuan tertentu.

KETUA RAPAT :

Tapi kita ini, sebenarnya ginilah, dulu namanya itu gabungan. BOB itu gabungan dua kan, Pertamina Hulu dan Bumi Siak Pusako. Nah, ketika setelah per September besok sudah enggak dua lagi, betul ya Pak ya? menjadi satu, gitu loh. Jadi Pertamina sudah enggak ada lagi di situ, gitu loh bang. Jadi sebenarnya kalau mau dilakukan audit, itu jauh lebih kepada PT Bumi Siak Pusako, karena entar pemegang mandat ke depan itu bukan Pertamina lagi, gitu. Pemegang mandatnya itu PT Bumi Siak Pusako. Jadi, panji pengelolaan terhadap apa, lapangan di Siak ini diserahkan kepada PT Bumi Siak Pusako. Jadi kita pikir, kalau auditnya menyeluruh, itu ke Pertamina dan juga PT Bumi Siak Pusako, sedangkan di situ 50:50, gitu bang.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya berarti yang diaudit BSP saja maksud Pimpinan kan? Iya tapi kan tadi ada yang kita pertanyakan. Kenapa Pertamina ini tiba-tiba tidak ikut di sini ini, gitu loh. Kan saya, ini satu-satunya model di Indonesia yang baru terjadi. Benarkan Pak Dirjen ya? Ini belum pernah terjadi ini. Nah sekarang mau dilanjutkan lagi. Perbuatan konyol ini menurut saya. Saya pun enggak ngerti kok bisa 100% gitu loh. Saya ini dalam hati saya, "ini siapa yang mengerjakan" saya pikir. Dulu yang kerja Pertamina ini sumur ini, yang kerja 100% Pertamina, gitu. Saya "kok tiba-tiba Pertamina hilang" gitu.

KETUA RAPAT :

Jadi mungkin gini Pak Nasir, karena ini Kepala SKK baru kan, proses perpanjangannya dilakukan oleh Kepala SKK sebelumnya, Pak Dwi. Mungkin yang dimaksud Pak Nasir, Komisi VII meminta SKK Migas, dirjennya juga Dirjen baru ini. Dulu kalau enggak salah Djoko Sis, Djoksis ya? Jadi, bukan kita ingin menyalahkan kebijakan yang lama, tapi Komisi VII meminta SKK Migas dan Dirjen Migas untuk melakukan ini, audit atau investigasilah gitu terhadap proses perpanjangan tahun 2018. Gitu ya?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, investigasi *due diligence*-lah gitu, kaya investasi ke seluruhnyalah Pak, kenapa itu bisa terjadi. Agak aneh juga itu, kok Pertamina bisa hilang? Kita kok, apa ini Pertamina, gitu pikir. Malah ini Pak, ini Rokan ini sekarang sampai Rantauprapat, ke mana-mana diurusin, yang cuman kandungannya nggak, dibanding ini nggak ada apa-apanya, iya kan? Lebih besar ini jauh, gitu. Terserah Pak *monggo*, auditnya masing-masing silakan, Pertamina sendiri diambil auditnya, karena kan pembagian terpisah itu. Nah nanti diambil auditnya BSP, tapi kita minta audit seluruhnya, Pak.

KETUA RAPAT :

Ini yang saya garis bawah. Mungkin ini Pak Nasir pengen proses dulu penetapan 2018 itu,

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Aneh.

KETUA RAPAT :

Di-*review*, gituloh, dicek ulang kan. Makanya sebenarnya yang poin 1 dan poin 2 itu bisa jadi 1 itu, gitu. Jadi selain mendesak Dirjen dan Kepala SKK Migas untuk meninjau kembali, dan juga melakukan audit terhadap proses perpanjangan tahun 2018 tersebut.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Takutnya ada tunggangan ini, Pak. Agak aneh gitu loh. Kok bisa tiba-tiba muncul begini. Kita pun bingung “ya kok bisa jadi kayak gini” gitu.

PEMERINTAH :

Kalau istilah audit memang kami tidak bisa apa ya, tidak, evaluasi ulang atau evaluasi menyeluruh.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, teknis kan Pak ya?

PEMERINTAH :

Iya, atau evaluasi menyeluruh.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, itu benar, maksud saya begitu.

Apa kajian Bapak, dulu waktu 2018 Ketua tadi ke sana, BSP nggak punya uang disuruh bangun ini, nah Pertamina mau bangun pipa, nah tiba-tiba sekarang Pertamina hilang. Kita kan bingung juga nih, ada apa ya?

Iya, iya, sudah itu. Itu tadi singkatan apa tadi?

PEMERINTAH :

Kalau yang terjadi, berarti itu BOB, Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Tambah satu poin saja lagi.

PEMERINTAH :

Kalau yang ke depan, berarti BSP. Kan kita mengevaluasi yang terjadi.

KETUA RAPAT :

Mengevaluasi yang jadi 100% ini, Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Bukan, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Prosesnya kan sudah terjadi juga, Pak, tinggal efektifnya saja kan?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Enggak, itu poin 2, itu SKK dan dirjen diminta untuk meninjau kan kejadian ini. Yang pertama kita minta 2002 ke 2021 diaudit. Iyalah, makanya kita melihat, dari sisi itu nanti nampak, apakah mereka mampu? Uangnya dari mana gitu loh. Ini kan ada beberapa pengelola yang menurut kita kan Pak tidak melakukan pembayaran pada kontraktornya, terus uangnya dikirim ke negaranya, kan gitu kan Pak ya? Pak Dirjen ya? Yang kita dapatin kemarin kan seperti itu. Nah, hasilnya kontraktor-kontraktor tidak dibayar, berhenti kan sumurnya? Nah, ini kan nanti bisa terjadi ini.

Nah, makanya saya minta audit tadi, kan saya minta juga dari BSP, 2002 sampai 2021, 2002 berapa dapat uangnya? Nanti saya takutnya begini, ada

manipulasi data yang dilakukan pakai dana APBD masuk, siap itu balikan lagi. Setelah dapat bankir kan, apa. Nah ini kita enggak tahu siapa nikmatin uang ini. Nah, jadi kita minta audit aja ini Pak dulu. Poin satu ini audit keseluruhan, pendapatan mereka berapa, *cost recovery*-nya berapa. Nah, nanti di situ nampak, gitu loh. Nah, nanti waktu rapat berikutnya kita minta, berapa sih keuangan BSP sekarang, nah gitu. Nanti kita libatkan saja instansi, kita minta juga instansi hukum untuk mengecek ini, gitu.

KETUA RAPAT :

Jadi, ini sudah cukup Pak Nasir. Jadi, ini kan sudah jelas.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya.

KETUA RAPAT :

Prosesnya 2018 itu kita minta evaluasi ya. Jadi gimana sih selama proses itu kan? Dulu Pak Dirjen juga..*(suara tidak jelas)*..

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Itu, izin Pimpinan. Itu poin dua berarti ya?

KETUA RAPAT:

Bisa, nomor satu, nomor dua boleh.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, jadi poin satu itu kita minta ditambahin. 2002 ke, enggak, audit itu saja, audit tadi itu sudah benar, tapi ke 2002 ke 2021. Nah, nanti di situ nampaknya itu. Tadi kan ada juga penyampaian “2020 kami 100% biyai, Pertamina nggak ikut”. Ada juga tadi bahasa gitu. Ada Pak kan? Nah, itu disampaikan juga di situ. Kok agak aneh gitu. Jadi maksud saya auditnya itu audit 2002 ke 2021, baru meninjau kembali. Nah, kita minta nanti dirjen dan SKK terhadap proses perpanjangan ini, gitu. Nah itu 2000-2021, nah itu. Jadi Pertamina itu bukan BSP saja, menurut saya.

KETUA RAPAT :

Pak Nasir, yang kita minta evaluasi itu adalah peralihan kan? Peralihan perpanjangan. Dulu kan konsesi ini dipegang oleh BOB kan? BOB itu gabungan antara Pertamina Hulu dan PT Bumi Siak Pusako. Namun per

September, tanggal 9 September 2022 itu sudah diputus akan diserahkan 100% kepada PT Bumi Siak Pusako. Begitu ya, Pak?

PEMERINTAH :

Maksudnya Pak Nasir itu akan menjadi poin dua, Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Betul.

PEMERINTAH :

Yang masukan poin dua, yang poin satu lebih.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Yang dimaksud, nah. Jadi Pak Pimpinan, di sini kan nanti terlihat yang ngerjakan BOB ini siapa? Masa' orang yang terima setoran bisa ngambil 100%? Itu kan logika akal sehat nggak bisa gitu loh. Ini kok bisa terjadi 2018, bagaimana caranya? Kan ada tiga kategori menunjuk seorang K3S itu, Pak, ada tiga kategori. Nah ada nggak di kategori di 2018 ditunjuk 100% itu? Gitu loh.

KETUA RAPAT :

Untuk mengaudit kalau posisi nomor satu, itu yang kita minta audit.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

22. 2002 ke 2021.

KETUA RAPAT :

Iya, itu auditnya, pengauditnya siapa?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

BPK dan internal SKK juga megaudit. Kan *cost recovery*-nya di SKK Migas, di SKK.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Dwi, coba diinikan.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Terima kasih, Pak.

Jadi kalau nomor satu itu kewenangan kita adalah mengaudit di BOB-nya, jadi BOB. Jadi apa namanya, iya yang gabungan itu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Pengelolaannya kan, Pak? Dan *cost recovery*-nya kan?

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Iya, iya, betul.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, di situ Pimpinan.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Jadi perpanjang wilayah kerja.

KETUA RAPAT :

Migas dong di situ?

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Untuk melakukan evaluasi.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Dirjen Migas, izin kontrak kan dikeluarkan oleh Dirjen Migas, Pimpinan, bukan SKK. Jadi Dirjen Migas, kontrak perpanjangan ini kan menteri yang keluaran atas. Nah, makanya dasarnya apa ditunjuk perpanjangan? Harus ada dasar teknis yang dijelaskan di sini. Saya nggak ngerti, kalau yang mengelola Pertamina sumurnya, terus yang duduk mandor nerimai duit saja gini bisa diperpanjang, saya nggak habis pikir ini. Siapa di belakang ini?

KETUA RAPAT :

Jadi itu yang nomor 1, Komisi VII meminta SKK Migas untuk melakukan audit terhadap proses apa, proses.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Mungkin yang dimaksud Pak Nasir adalah audit apa namanya, audit keuangan, audit.

KETUA RAPAT :

Kalau audit keuangan itu ada, setiap tahun pasti ada Pak.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT :

Kalau PDTT kita harus tahu temanya yang kita mintakan ke BPK.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Kalau untuk maksud tertentu harus ada ininya betul.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Begini Pimpinan,

Di *cost recovery* itu kan nanti nampak semua dia. Di *cost recovery* itu jelas nanti, berapa pembiayaan sumur, dipakai buat apa, sisanya berapa. Kan nampak di situ Pak, *cost recovery* itu. Itu jelas di situ. Nah.

KETUA RAPAT :

Gini, Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Sebentar Pimpinan.

Yang teknis tadi itu terpisah, itu Pak Dirjen, biarkan timnya bekerja, bagaimana penunjukkan ini. Nanti kan, datanya juga kan pasti ada di kementerian ini. Dasar apa ditunjuk ini? Gitu. Jadi boleh ditambahkan poin lagi, Pak Dirjen dimuat sendiri, gapapa gitu. Jadi terus kita juga Komisi VII nanti menyurati BPK minta ini diaudit. Saya yakin, audit BPK-nya kalau ada bisa disampaikan di sini. 2002 berapa, 2000, mana datanya? Itu bisa disampaikan, tapi kan *nggak* ada sampai sekarang audit BPK-nya dan yang disampaikan BSP tadi cuman 2021 dia diaudit sama BPK.

KETUA RAPAT :

Tapi kalau audit BPK, sekretariat bisa meminta kepada BPKRT atau lewat BAKN, bisa meminta itu. Sebenarnya gini Pak Nasir, kalau soal BPK, itu bisa kita mintakan lewat BAKN. Jadi mungkin yang tadi dipesan Pak Nasir, Komisi VII meminta kepala SKK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap *cost recovery*, wilayah kerja, apa ya, *cost recovery*, wilayah kerja CPP, BOB, BOB Siak itu ya kan? Yang berdua itu kan? Gitulah ya, dari tahun 2002 sampai 2021. Gitu Pak Nasir? Oke. BOB apa namanya? BOB Siak ya? Yang dulu. BOB Siak Bumi Pusako ya? Hah?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

BOB buka kurung Pertamina apa namanya?

KETUA RAPAT :

Garis miring itu kalau nggak salah, mana tadi?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Pertamina, strip BSP itu ya?

KETUA RAPAT :

Oh iya, iya, iya. Tahun 2020.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

2002.

KETUA RAPAT :

Eh 2002 sampai 2021. Beh, lama sekali ini.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak ada ini sampai ini hari, dan gini Pimpinan, makanya tadi kita minta Komisi VII juga mengirimkan surat ke BPK.

KETUA RAPAT :

19 tahun ini, Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, jadi ke BPK itu, ini audit BPK-nya belum ada. Nah, kita minta juga. Nanti Komisi VII kirimkan lewat Pimpinan DPR ke BPK untuk menyamakan

hasil audit yang ada di SKK gitu. Kita sinkronkan ini Pak, iya kan? *Apple to apple* gitu.

KETUA RAPAT :

Oke, baik entar DPR akan meminta, enggak usah ditulis. DPR kalau soal audit dari 2002 sampai 2021 kita bisa meminta kok, termasuk PDTT-nya juga. Kan pasti ada itu, setiap bulan Maret kan pasti masuk PDTT, gitu. Oke ya? kita sepakati ya poin 1?

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VII DPRRI meminta SKK Migas dan Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perpanjangan wilayah kerja *cocktail* eh *Coastal Plain*, *cocktail* sampai ke mana *sorry, sorry. Coastal Plain* dan Pekanbaru (CPP) kepada PT Bumi Siak Pusako yang berlaku sejak ya? Yang efektif sejak tanggal 19, eh 9 September 2022. Kan harus jelas itu kan. 9 Agustus *sorry*, 9 Agustus. Karena habisnya yang BOB ini 8 Agustus ya? Iya. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VII DPRRI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak wilayah kerja *Coastal Plain* dan Pekanbaru (CPP) pada Bumi Siak Pusako dan hasilnya dilaporkan pada Komisi VII.

Setuju?

..... :

Sama dengan yang di atasnya, Pak.

KETUA RAPAT :

Oh sama? Ya hapus itu. Hapus, sudah.

3. Komisi VII, nomor 3 ini yang terakhir ini. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut Pertamina Hulu Energi, Persero, Dirut PT Bumi Siak Pusako, untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPRRI selambat-lambatnya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin Pimpinan. Nggak bagus poin, ini poin 4, poin 3, kita buat jadwal ulang gitu?

KETUA RAPAT :

Ntar kalau jadwal kita bisa jadwalkan di agenda.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Oh, gitu ya? *Oke* terima kasih.

KETUA RAPAT :

Selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2022. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Sudah.

KETUA RAPAT :

Sudah ya?

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Audit terhadap BPK belum masuk.

KETUA RAPAT :

Audit BPK? Bukan, audit BPK tadi..*(suara tidak jelas)*..temanya apa yang mau kita mintakan audit?

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ini kan selama BOB antara Pertamina Hulu dan PT Bumi Siak, ini kan apakah ada kerugian negara di sini? Kan begitu. Tentunya dan ini akan diambil alih seluruhnya nanti pengelolanya kepada PT Bumi Siak Pusako untuk mengurangi ataupun paling tidak ketika mereka mengelola ke depan itu sudah *clear* semua persoalan keuangan, kerugian negara apa tidak. Kalau tidak ada, berarti mereka ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Saya pikir perlu dimasukkan audit khusus dengan tujuan tertentu.

KETUA RAPAT :

Saya ini Bang, Pak Nasril, jadi kita minta saya sekretariat untuk menghubungi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di sebelah, untuk meminta audit BPK dari tahun 2002 sampai tahun 2022 terhadap BOB Siak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

2021, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Eh *sorry* sampai tahun 2021, belum selesai.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Tapi khusus dia mengaudit.

KETUA RAPAT :

Eenggak, semua. PDTT dan juga audit biasanya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak perlu kita masuk sini? Nggak usah?

KETUA RAPAT :

Nggak perlu, karena itu yang bisa meminta hasil audit. Sebenarnya kita tiap tahun dikasih oleh BPK, kan. Setiap tahun itu semua hasil audit ada di sebelah. Kayak contoh tadi kita rapat, saya sudah baca audit PDTT terhadap PT Krakatau Steel semua dari tahun 2016. Kami sudah mintakan, gitu. Jadi sama seperti itu, itu sekretariat yang bisa minta, Bang.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ya, mungkin Pimpinan, segera sekretariat buat surat biar dikirim Pimpinan ke Pimpinan DPR, langsung kirim kan ke BPK ya, dan dibagikan ke setiap anggota.

KETUA RAPAT :

Entar kita minta kepada staf ahli komisi untuk menelaah seluruh temuan dari audit BPK, karena banyak banget itu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, setuju. Hasilnya nanti dibagikan ke setiap anggota.

KETUA RAPAT :

Jadi itu ya, Pak ya, semua kesimpulan telah kita sepakati.

Mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kepala SKK, Pak Dirjen, Pak Direktur kan, dan juga Pak Dirut untuk memberikan *closing statement*.

Mungkin Pak Dirjen terlebih dahulu, silakan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (IR. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., PH.D., IPU.):

Terima kasih.

Pimpinan yang terhormat.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak dibacakan ulang dulu Pimpinan? Nanti ada yang salah lagi. Sebelum ditutup nanti ya. Ayo silakan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (IR. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., PH.D., IPU.):

Baik. Terima kasih.

Pimpinan yang terhormat, dan
Seluruh Anggota Komisi VII DPRRI yang terhormat.

Terima kasih atas diskusi pada pagi ini dan apa yang kita sampaikan pada saat ini adalah sesuatu hal yang kita gali dari informasi yang ada di Dirjen Migas, Pak. Nanti kita akan melaksanakan apa yang disampaikan jadi amanah dari kesimpulan ini, kita akan laporkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Dirjen.

Selanjutnya Pak Dwi. Langsung ini ya Pak, mewakili Pak Direktur Pertamina Hulu Energi, silakan.

KEPALA SKK MIGAS (DR. IR. DWI SOETJIPTO, M.M.):

Baik, Pak.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Saya kira dari kesimpulan ini intinya kami dari Pertamina Hulu Energi akan merespon sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Terima kasih atas arahan kemudian masukan, dan akan kami tindaklanjuti.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Dirut PT Bumi Siak Pusako.

DIRUT PT BUMI SIAK PUSAKO (Ir. ISKANDAR):

Terima kasih.

BSP secara prinsipnya adalah taat hukum dan siap menjalankan semua yang, permintaan yang diminta dalam pengelolaan blok ini, baik belakang maupun ke depan nantinya, sesuai dengan, asal sesuai dengan perundangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku, Pak. Itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik.

Terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Kepala SKK, Pak Direktur Hulu Migas, juga Pak Direktur Pertamina Hulu Energi, serta Pak Dirut PT Bumi Siak Pusako. Intinya ke depan kita sama-sama bekerja, karena ini proses membuat kita semua bertanya-tanya ada peralihan 100%, bahkan Pertamina salah satu BUMN andalan Republik Indonesia kan, untuk bantu pengembangan Mandalika saja apa namanya, Pertamina berani. Buat kami aneh ketika hanya untuk mengambil apa namanya, blok lapangan, Pertamina mundur teratur. Ini yang menjadi pertanyaan kami.

Kami tidak ingin mengapa, *merecokin* atau mengganggu proses yang sudah ada. Tapi kami ingin semua *clear*, karena memang itu tugas konstitusional kami melakukan fungsi pengawasan, jangan sampai pengelolaan sumber daya negara terbengkalai ke depannya. Kita ingin ada kepastian bahwa sumber daya negara, sumber daya alam ini dikuasai negara dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami juga akan melakukan audit kan, dalam artian kami memiliki tenaga ahli di komisi, kami akan minta audit BPK kan, untuk kita akan *compare* dengan hasil audit yang dilakukan oleh SKK dan juga Dirjen Migas. Kita akan sinkronkan ke depannya, karena bagaimanapun entar ke depan harus menghasilkan pengelola sumberdaya yang kredibel dan juga bisa meningkatkan *lifting* minyak ke depannya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin Pimpinan,

Jadi, maksud Pimpinan tadi kita nggak percaya sama Pertamina nanti ke depan? Ya kalau *nggak* percaya biar nanti yang di Jambi kita copotin aja kalau gitu, nggak usah dikelola mereka lagi, karena ini nggak jelas ini Pertamina nanti. Kalau ini *enggak* bisa diluruskan betul sama Pak Dirjen, sama SKK nanti ya kan?

KETUA RAPAT :

Baik.

Ini Pak Nasir, karena ini sudah ujung-ujung, kita.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Enggak, enggak, maksud saya. Ini, ini betul, ini kan.

KETUA RAPAT :

Enggaklah, kita ini sangking percayanya kepada Badan Usaha Milik Negara kita kan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, kalau nggak percaya lagi, maksud saya tadi.

KETUA RAPAT :

Kita meyakini bahwa Indonesia akan mandiri energi juga kan, bahwa perusahaan BUMN kita juga kuat-kuat kan. Apalagi didukung oleh Kepala SKK yang wah lumayan lincah kan, dan Pak Dirjen yang kreatif.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Kuat-kuat jugalah Pimpinan, iya kan?

KETUA RAPAT :

Jadi, itu Pak Kepala, Pak Dirjen,

Intinya Komisi VII ingin bekerja membantu pemerintah ke depannya agar pengelolaan sumber daya ini tepat sasaran. Mungkin itu.

Dengan ini saya nyatakan karena waktu sudah sore juga kan. Nggak perlu perpanjangan ya?

Jadi terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Kepala, dan juga Pak Dirut Hulu Energi, dan juga Kepala Dirut Bumi Siak Pusako serta jajaran, dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami atas nama Pimpinan Komisi VII juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi VII yang menyempatkan ikut rapat dengar pendapat dengan mitra-mitra Komisi VII.

Akhirnya, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat dengar pendapat, saya nyatakan ditutup.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002